



**BAPPEDA
LITBANG**
KABUPATEN BOGOR



LKIP 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Bappedalitbang tahun 2024, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappedalitbang Kabupaten Bogor Tahun 2024 disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan Program/Kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana strategis (Renstra) Bappedalitbang Tahun 2024-2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKIP Bappedalitbang Tahun 2024 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan public, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Bappedalitbang kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Plt. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN BOGOR



Ir. SURYANTO PUTRA, M.Si.
NIP. 19670626 199901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	10
1.4.1 Kekuatan / Peluang Pengembangan	10
1.4.2 Tantangan	11
1.4.3 Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan	12
1.5 Sumber Daya Manusia	13
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II	19
PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Perencanaan Strategis	19
2.2 Tujuan dan Sasaran	19
2.4 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	22
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	26
Bab III.....	29
Akuntabilitas Kinerja.....	29
3.1 Capaian Kinerja	30
3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	31
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Sekarang dengan Tahun Sebelumnya.....	32
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Jangka Menengah Renstra.....	37
3.1.4 Perbandingan Kinerja dengan Skala Nasional/Provinsi.....	38
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	39
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	42
3.1.7 Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	47
3.2 Realisasi Anggaran.....	59
Bab IV.....	65
PENUTUP.....	65
4.1 KESIMPULAN.....	65
4.2 Saran Perbaikan Kedepan / Rekomendasi.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Metode penyusunan LKIP Bappedalitbang Kabupaten Bogor Tahun 2024 secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Selain itu, penyusunan LKIP juga mengacu pada Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (P-RPD) Bappedalitbang Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, Rencana Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah dalam APBD Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 ini berisi informasi seputar capaian pelaksanaan Rencana Kerja, yang bertujuan untuk:

- a. Mengukur Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor yang transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan;
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah;
- d. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis selama Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

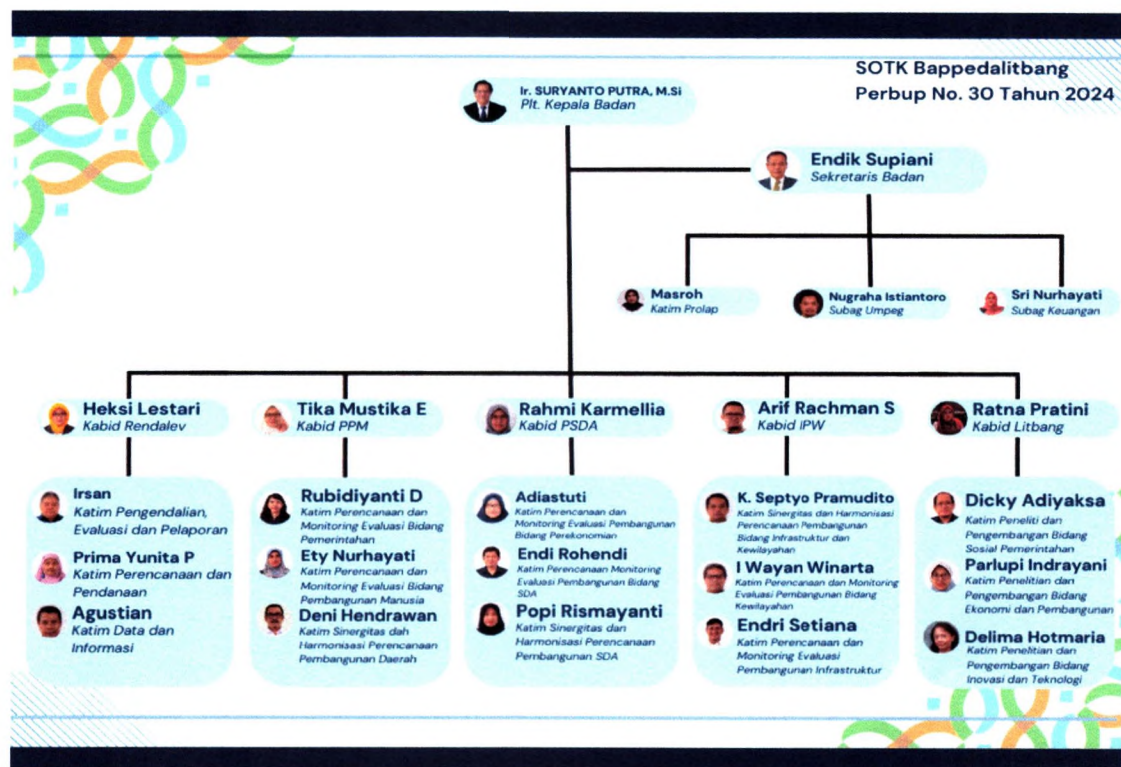
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjina Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor; dan
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor, memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor memiliki fungsi:

- (1) penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
- (2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;

- (3) Pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
- (4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang perencanaan, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
- (5) Pelaksanaan administrasi Badan;
- (6) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- (7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.



Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Bogor Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Kepala Badan;
- (2) Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan badan dan mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan program kerja Sekretariat:

- (b) Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
- (c) Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan;
- (d) Pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
- (e) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
- (f) Pengelolaan keuangan dan asset Badan;
- (g) Pengelolaan hubungan masyarakat;
- (h) Pelaksanaan dan pengkoordinasian penilaian reformasi birokrasi;
- (i) Pengelolaan system informasi Badan; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat, membawahkan :

- (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - (c) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan renja) dan merumuskan bahan rencana pendanaan pembangunan non APBD Kabupaten Bogor;
- (b) Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;
- (c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah serta pengendalian dan evaluasi pendanaan non APBD Kabupaten Bogor;

- (d) Penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian sistem dan dan informasi pembangunan daerah.
- (e) Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- (f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- (g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

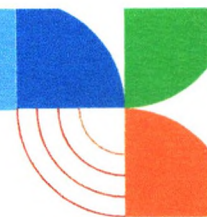
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;

- (4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJBD, RPJMD dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan renja) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- (b) Penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- (c) Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- (d) Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- (e) Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada



perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- (f) Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- (g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- (h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJBD, RPJMD dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan renja) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- (b) Penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- (c) Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- (d) Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- (e) Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;



- (f) Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- (g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- (h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;

(6) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJBD, RPJMD dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan renja) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- (b) Penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- (c) Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- (d) Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- (e) Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- (f) Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- (g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan

(h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;

(7) Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- (a) Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- (b) Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- (c) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah; Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- (e) pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- (f) pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

- (g) koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
- (h) koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- (i) pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Riset Inovasi Daerah;
- (j) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Riset Inovasi Daerah; dan
- (k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
Fungsional;

(8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Analisis terhadap permasalahan dan isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana Pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Permasalahan dan isu strategis tersebut diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi organisasi dimasa yang akan datang.

1.4.1 Kekuatan / Peluang Pengembangan

- a. Kewenangan dan peran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor yang masih kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran dan pengendalian dalam pembangunan;

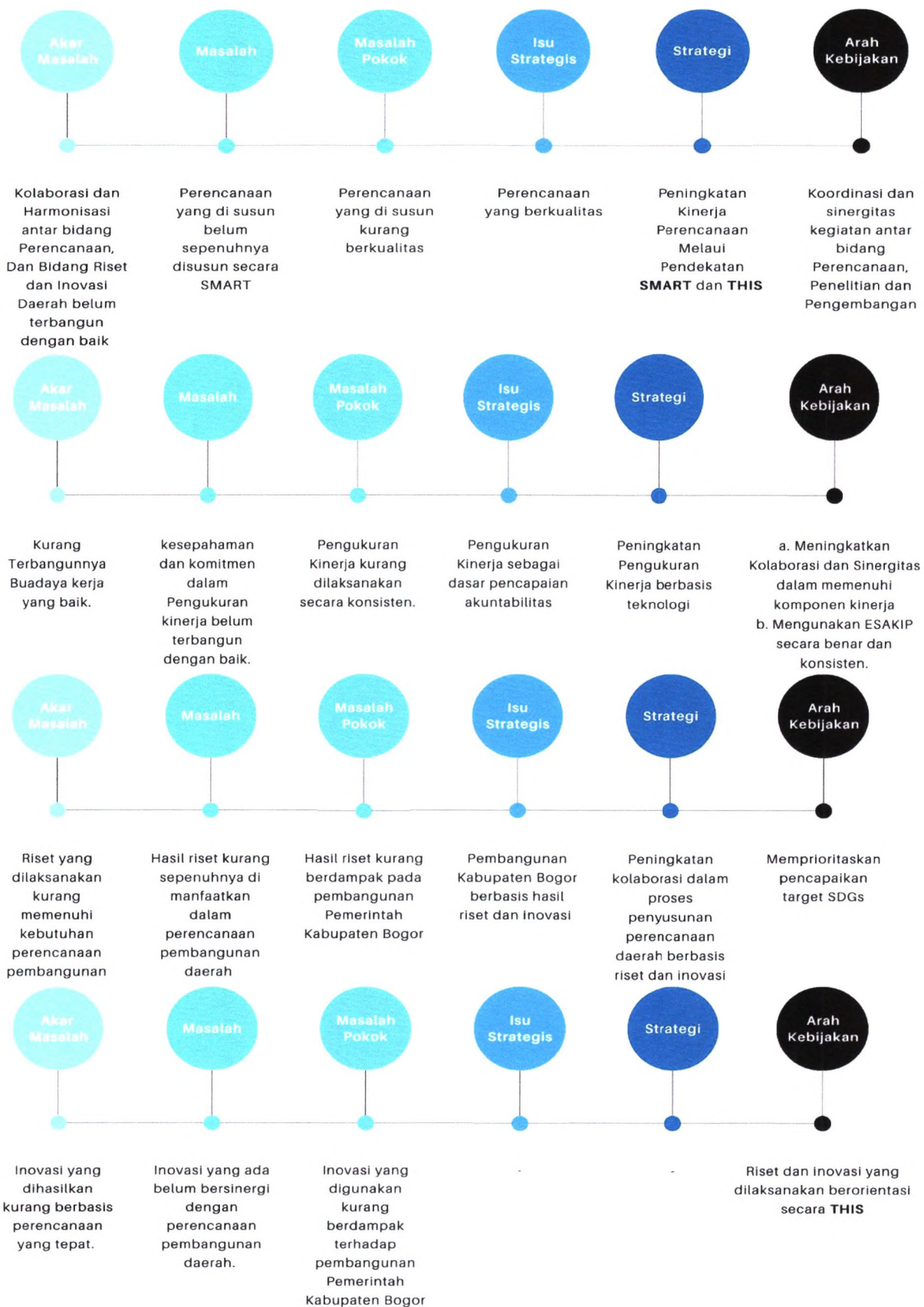
- b. Kewenangan yang jelas dan menjadikan struktur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor lebih efektif dan efisien;
- c. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung institusi Badan Perencanaan Pembangunan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
- d. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan tujuan organisasi, komitmen pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor sangat tinggi untuk mewujudkan tercapainya tujuan organisasi. Kebijakan, arahan dan aktivitas pimpinan dalam mendorong semua aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sangat kuat, ini membuktikan dengan upaya pencapaian target yang harus maksimal dalam pencapaian target.

1.4.2 Tantangan

- a. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan;
- b. Keterbatasan kompetensi SDM Perencanaan dan Kelitbang, dari jumlah pegawai yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor masih memerlukan peningkatan kualitas dan kompetensi melalui bimbingan teknis maupun pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- c. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappedalitbang Kabupaten Bogor dengan perangkat daerah lain yang seringkali menyebabkan belum terwujudnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
- d. Rendahnya pemahaman dan animo perangkat daerah dalam memanfaatkan dokumen perencanaan dan kajian-kajian yang telah dilaksanakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait dengan perencanaan pembangunan di masa mendatang;
- e. Perlunya penambahan dan peningkatan kapasitas Bappedalitbang Kabupaten Bogor baik secara kualitas maupun secara kuantitas.

1.4.3 Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan permasalahan utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dapat dirumuskan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor adalah :



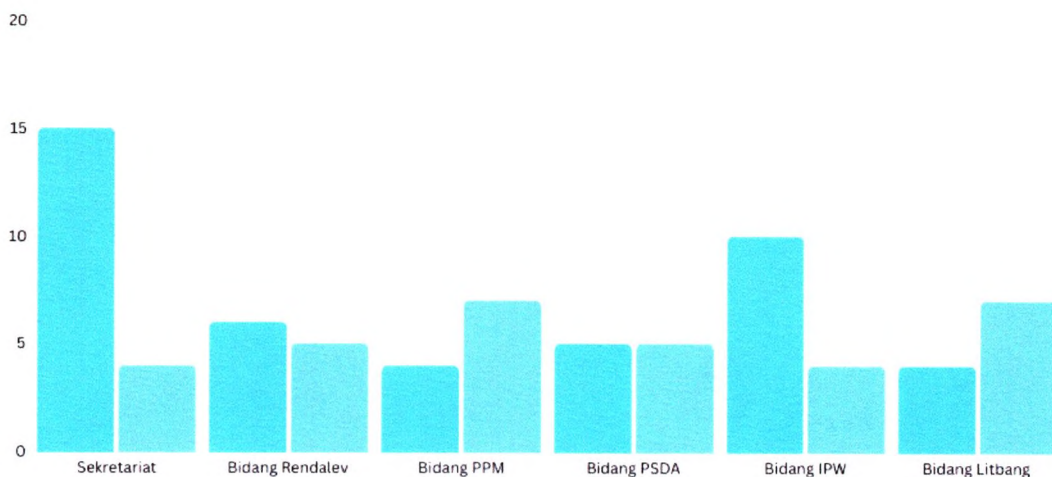
NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Kolaborasi dan Harmonisasi antar bidang Perencanaan, Dan Bidang Riset dan Inovasi Daerah belum terbangun dengan baik	Perencanaan yang di susun belum sepenuhnya disusun secara SMART	Perencanaan yang di susun kurang berkualitas	Perencanaan yang berkualitas	Peningkatan Kinerja Perencanaan Melalui Pendekatan SMART dan THIS	Koordinasi dan sinergitas kegiatan antar bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
2	Kurang Terbangunnya Budaya kerja yang baik	kesepahaman dan komitmen dalam Pengukuran kinerja belum terbangun dengan baik	Pengukuran Kinerja kurang dilaksanakan secara konsisten	Pengukuran Kinerja sebagai dasar pencapaian akuntabilitas	Peningkatan Pengukuran Kinerja berbasis teknologi	a. Meningkatkan Kolaborasi dan Sinergitas dalam memenuhi komponen kinerja b. Menggunakan ESAKIP secara benar dan konsisten
3	Riset yang dilaksanakan kurang memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah	Hasil riset kurang sepenuhnya di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Hasil riset kurang berdampak pada pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor	Pembangunan Kabupaten Bogor berbasis hasil riset dan inovasi	Peningkatan kolaborasi dalam proses penyusunan perencanaan daerah berbasis riset dan inovasi	Memprioritaskan pencapaian target SDGs
4	Inovasi yang dihasilkan kurang berbasis perencanaan yang tepat.	Inovasi yang ada belum bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah.	Inovasi yang digunakan kurang berdampak terhadap pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor			Riset dan inovasi yang dilaksanakan berorientasi secara THIS

1.5 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor pada Tahun 2024 terdapat sebanyak 73 Orang Pegawai ASN dan 3 Orang Pegawai PPPK dengan jumlah total pegawai sebanyak 76 Orang dengan Profil Demografi Pegawai sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

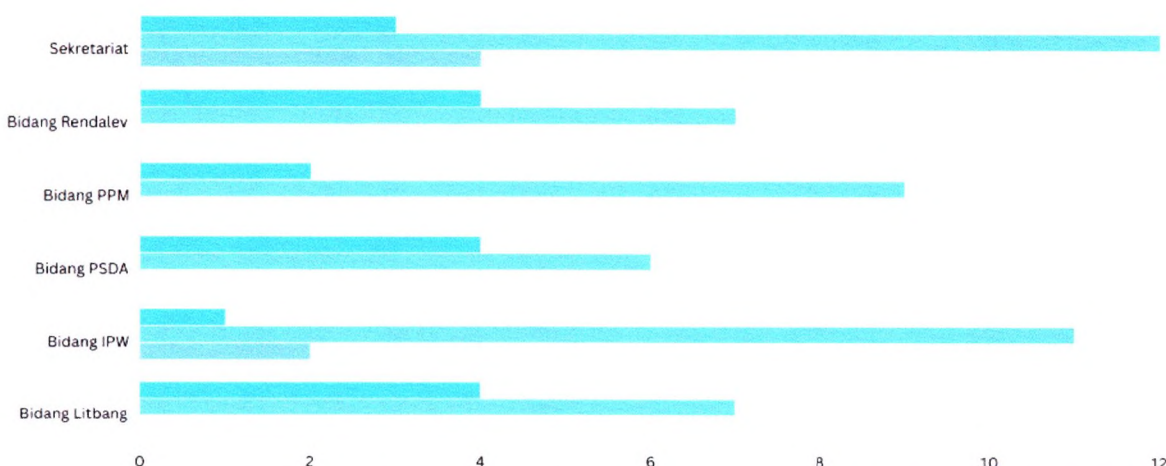
Berdasarkan diagram diatas diketahui bahwa pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah



	Sekretariat	Bidang Rendalev	Bidang PPM	Bidang PSDA	Bidang IPW	Bidang Litbang
Laki-Laki	15	6	4	5	10	4
Perempuan	4	5	7	5	4	7

Kabupaten Bogor di dominasi oleh laki-laki sebanyak 44 orang atau sekitar 57.89% dibandingkan dengan perempuan sebanyak 32 orang atau sekitar 42.11%.

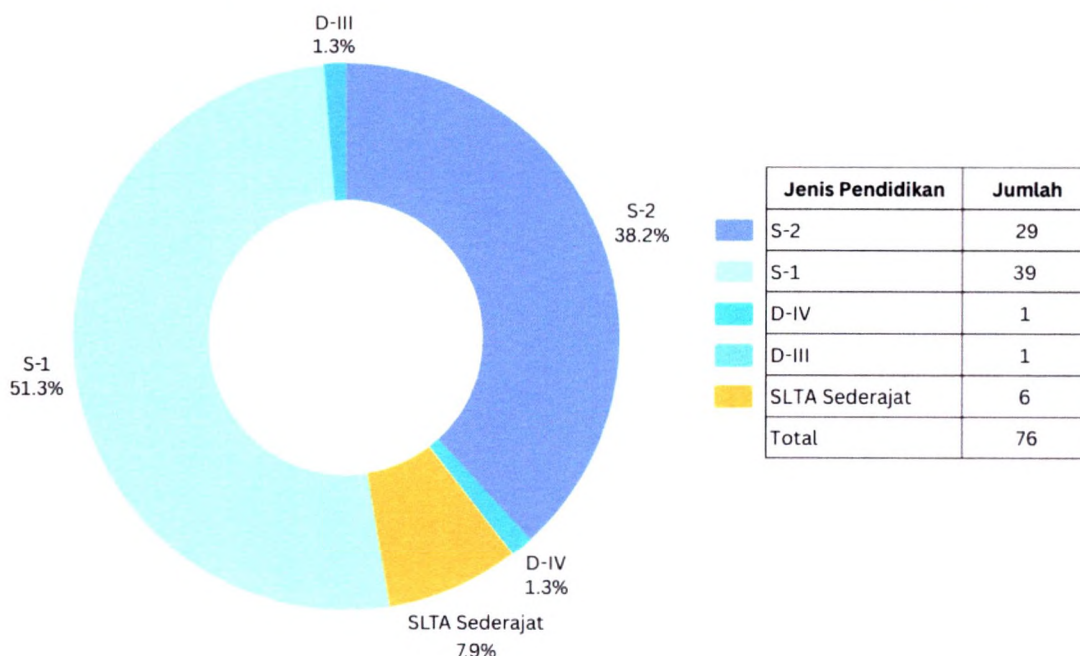
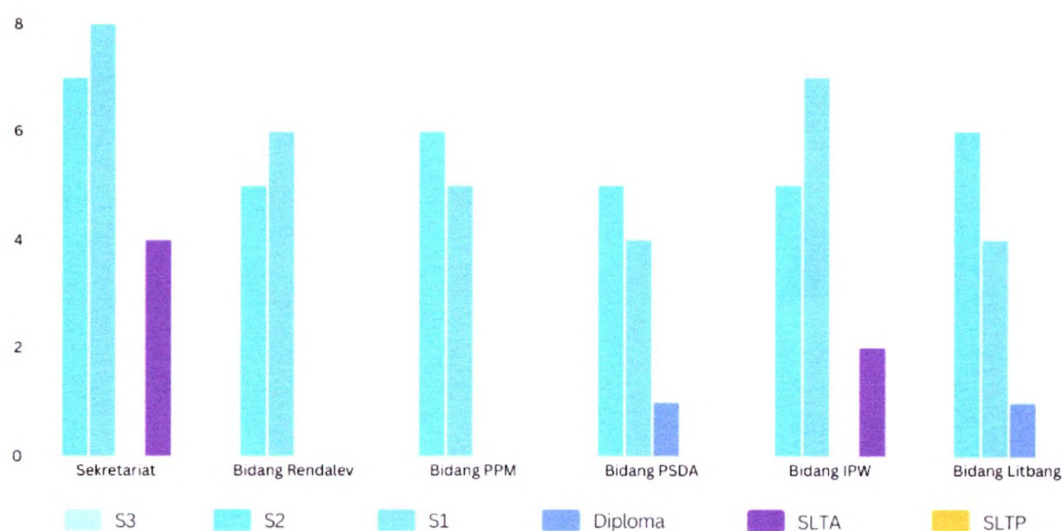
b. Jumlah Pegawai Menurut Golongan



Unit Kerja	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
Sekretariat		4	12	3	19
Bidang Rendalev			7	4	11
Bidang PPM			9	2	11
Bidang PSDA			6	4	10
Bidang IPW		2	11	1	14
Bidang Litbang			7	4	11
Total		6	51	19	76

Berdasarkan diagram diatas Pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 19 Orang, pegawai yang menempati Golongan III sebanyak 51 Orang dan Pegawai yang menempati Golongan II sebanyak 6 Orang.

c. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan



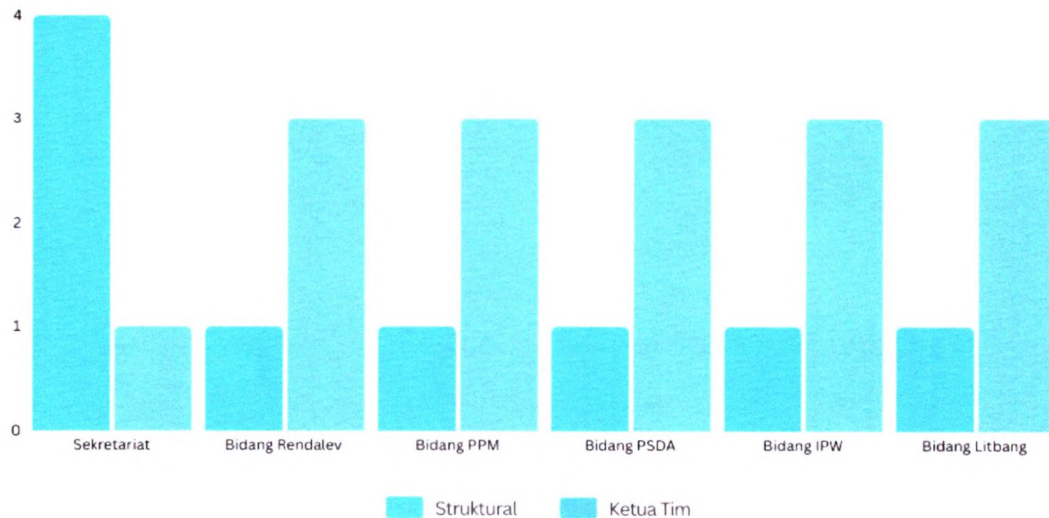
Berdasarkan diagram diatas Pegawai yang menempati tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 6 (enam) orang, pegawai dengan tingkat Diploma sebanyak 2 (dua) orang, pegawai dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, dan pegawai dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang.

Dengan berdasarkan tingkat pendidikan tersebut, hal ini merupakan sebuah potensi yang perlu untuk terus ditumbuhkembangkan dari segi Sumber Daya Manusia sebagai salah satu upaya dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.

d. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor, jumlah jabatan struktur yang tersedia berjumlah 9 jabatan, dan Jabatan Fungsional Perencana sebagai Ketua Tim berjumlah 16 jabatan.



No	Bidang	Jabatan		Jumlah
		Struktural	Ketua Tim	
1	Sekretariat	4	1	5
2	Bidang Rendalev	1	3	4
3	Bidang PPM	1	3	4
4	Bidang PSDA	1	3	4
5	Bidang IPW	1	3	4
6	Bidang Litbang	1	3	4
Total		9	16	25

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan pendekatan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi Organisasi.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional(jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatifiv solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran



Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (P-RPD) Tahun 2024-2026 merupakan dokumen yang disusun sebagai Upaya untuk mewujudkan dan menjaga kesinambungan dalam perencanaan pembangunan daerah pada masa pemilihan serentak. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana isinya adalah menginstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 agar Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2024-2026.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku koordinator dan perencana pembangunan daerah di Kabupaten Bogor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati nomor 30 tahun 2024 tentang SOTK Bappedalitbang Kabupaten Bogor, maka pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 mengacu Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (P-RPD) Bappedalitbang Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.

Dokumen tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dengan Menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra Perubahan) Tahun 2024-2026, yang memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di perangkat daerah termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor agar seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dalam dokumen perencanaannya menetapkan tujuan yang sinergi dengan dokumen P-RPD Tahun 2024-2026 Kabupaten Bogor. Adapun tujuan yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Badan

Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor adalah:

“Terwujudnya perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas”

Sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan Pembangunan daerah;
2. Meningkatnya kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan Pembangunan daerah;
3. Meningkatnya hasil Riset dan Inovasi yang bermanfaat.

Penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Perubahan Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Sasaran			Tujuan		
Meningkatnya kualitas Perencanaan kinerja pembangunan	Meningkatnya kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan	Hasil Riset dan Inovasi yang bermanfaat	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas		
Indikator Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP	Indikator Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP	Indikator Kebijakan hasil riset yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemerintah	Indeks Inovasi Daerah		
Target	Target	Target	Target		
23.81 Poin Tahun 2024	15.83 Poin Tahun 2024	1 Kebijakan Tahun 2024	2024, 2025, 2026		
23.91 Poin Tahun 2025	17.43 Poin Tahun 2025	1 Kebijakan Tahun 2025	Sangat Inovatif		
24.29 Poin Tahun 2026	18.22 Poin Tahun 2026	1 Kebijakan Tahun 2026			

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal

maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan atas lingkungan Strategis internal dan eksternal

	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas dan Fungsi Bappedalitbang 2. Mempunyai fungsi koordinasi Lintas Sektor antar SKPD, Instansi Vertikal dan Non Pemerintah 3. Mempunyai akses data dan informasi yang luas dan cepat dengan pemerintah provinsi dan pusat 4. Sudah terbentuknya jaringan penelitian 5. Mekanisme dan tatakerja bappedalitbang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum efektifnya koordinasi antar bidang perencanaan dan kelitbangan. 2. Keterbatasan Kompetensi SDM Perencana dan Kelitbangan. 3. Keterbatasan Data dan informasi yang terstruktur, sistematis dan mutakhir. 4. Belum optimalnya penentuan pendanaan untuk prioritas pembangunan daerah. 5. Belum sinerginya perencanaan pembangunan dengan kebijakan penataan ruang daerah. 6. Belum optimalnya mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah yang efektif. 7. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan administrasi umum
	PELUANG (OPPORTUNITY)	ANCAMAN (THREAT)
EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Peraturan Perundangan dan Pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan. 2. Dinamika tuntutan dan harapan masyarakat. 3. Dukungan pendanaan Non APBD (APBN, APBD Prov). 4. Adanya sistem Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi. 5. Dukungan kepala daerah. 6. Status Fungsional Perencana di Perangkat Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakpastian proyeksi pendanaan pembangunan daerah. 2. Sulitnya pengintegrasian kepentingan politis, sosial dan instisional dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. 3. Adanya ego sektoral perencanaan pembangunan daerah. 4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi oleh dunia usaha, masyarakat dan pemerintah dalam mendukung daya saing daerah.

Berkenaan hasil analisis tersebut diatas maka strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja perencanaan melalui pendekatan SMART dan THIS;
2. Koordinasi dan sinergitas kegiatan antar bidang perencanaan penelitian dan pengembangan;
3. Peningkatan pengukuran kinerja berbasis teknologi;

4. Meningkatkan kolaborasi dan sinergitas dalam memenuhi komponen kinerja;
5. Menggunakan ESAKIP secara benar dan konsisten;
6. Peningkatan kolaborasi dalam proses penyusunan perencanaan daerah berbasis riset dan inovasi;
7. Riset dan inovasi yang dilaksanakan berorientasi secara THIS.

2.4 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

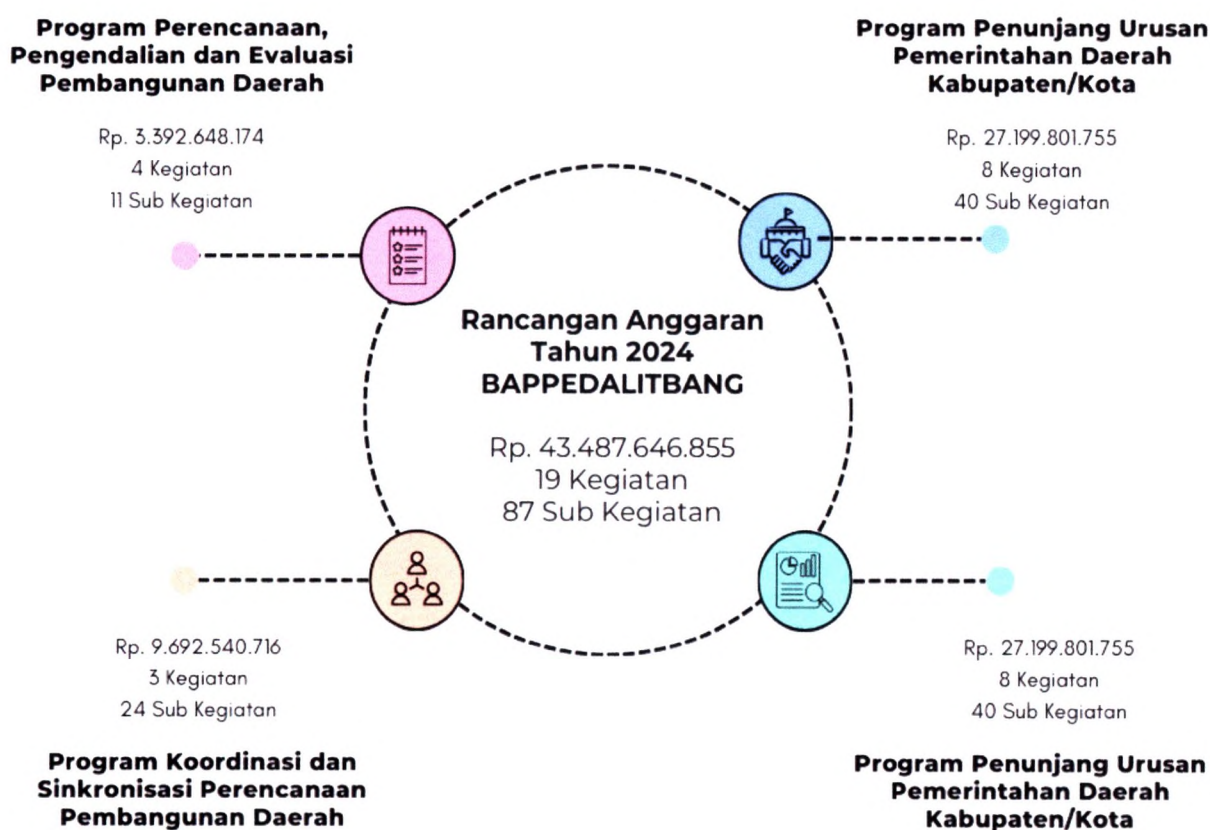
Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran Strategis pada Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Keselarasan Sasaran, Indikator Kinerja dengan Program Tahun 2024



Anggaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang mencapai kinerja Tahun 2024 Sebesar Rp. 43.487.646.855 Yang terdiri dari 4 Program, 19 kegiatan dan 87 Sub Kegiatan sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024



No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1.3.2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
1.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
1.4.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
1.4.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.4.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
1.4.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
1.4.6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.4.7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.4.8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.5.6	Fasilitas Kunjungan Tamu
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.5.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.5.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.6.3	Pengadaan Mebel
1.6.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.6.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	2.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2.1.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
2.1.2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
2.1.3	Pelaksanaan Konsultasi Publik
2.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
2.1.5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
2.1.6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
2.1.7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
	2.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
2.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2.2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
	2.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
2.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
2.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	2.4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
2.4.1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (JPD, JMD dan RKPD)
3.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
3.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
3.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
3.1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (JPD, JMD dan RKPD)
3.1.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
3.1.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
3.1.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (JPD, JMD dan RKPD)
3.2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
3.2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
3.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
3.2.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
3.2.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
3.2.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
3.2.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
	3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
3.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (JPD, JMD dan RKPD)
3.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
3.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
3.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
3.3.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (JPD, JMD dan RKPD)
3.3.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
3.3.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
3.3.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
4	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
	4.1 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
4.1.1	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset
	4.2 Invensi dan Inovasi
4.2.1	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi
4.2.2	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional
4.2.3	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan
4.2.4	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi
4.2.5	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah
4.2.6	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.
4.2.7	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka perlu

disusunlah suatu penetapan kinerja dan target-target setiap indikator sasaran pada penetapan kinerja yang diperjanjikan. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Bupati Bogor) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/kegiatan serta merupakan wujud komitmen antara penerima Amanah dan pemberi Amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia secara berkesinambungan setiap tahunnya. Perjanjian kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi Amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi Amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja disusun paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian kinerja ini menyajikan Indikator Kinerja Utama

yang menggambarkan hasil utama dan kondisi yang seharusnya dicapai, tanpa mengesampingkan indicator lain yang relevan. Perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

<p>Sasaran</p> <p>Meningkatnya kualitas Perencanaan Kinerja pembangunan. Indikator Kinerja</p> <p>Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP.</p>	<p>Sasaran</p> <p>Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan. Indikator Kinerja</p> <p>Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP.</p>	<p>Sasaran</p> <p>Meningkatnya hasil riset dan inovasi yang bermanfaat. Indikator Kinerja</p> <p>Persentase riset yang menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah.</p>
<p>Target</p> <p>23,81 Poin</p> 	<p>Target</p> <p>15,83 Poin</p> 	<p>Target</p> <p>100%</p> 
<p>Indeks Inovasi Daerah</p>		<p>Target</p> <p>Sangat Inovatif</p>



Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan baik secara perorangan, organisasi atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi tersebut, maka pengukuran kinerja dilakukan terhadap seluruh aktivitas program kegiatan yang dilaksanakan, kemudian proses pengukuran kinerja tidak hanya sampai pada aspek masukan (*input*), keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) saja, tetapi lebih ditekankan kepada tercapainya tujuan secara efektif dan efisien yang mampu menggambarkan kemanfaatan dan dampak yang dirasakan dari pelaksanaan program kegiatan tersebut.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu Kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2023 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi yang menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$



b. Tingkat Realisasi Negatif

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Keterangan: PRTC adalah Pecapaian Rencana Tingkat Capaian

Kemudian hasil pengukuran akan diinterpretasi kinerja kedalam skala penilaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan Skala nilai Penilaian Kinerja sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Skala Penilaian

No	Nilai Angka	Interpretasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.1 Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 sebagaimana tabel diatas, dilakukan dengan menghitung rata-rata pencapaian dari setiap indicator kinerja sasaran yang telah ditetapkan kemudian diinterpretasi kinerja berdasarkan skala penilaian yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis terhadap indicator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Data hasil realisasi terhadap indikator kinerja sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 dibandingkan dengan target kinerja sasaran Tahun 2024 dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024



Berdasarkan dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dengan kriteria penilaian dari sasaran ke satu yaitu meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan Pembangunan mendapatkan capaian realisasi 100% dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi. Begitu juga dengan sasaran ke dua yaitu meningkatnya kualitas pengukuran kinerja Pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan Pembangunan daerah mendapatkan capaian realisasi sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi dan sasaran yang ke tiga yaitu hasil riset dan inovasi yang bermanfaat menunjukkan hasil capaian realisasi sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

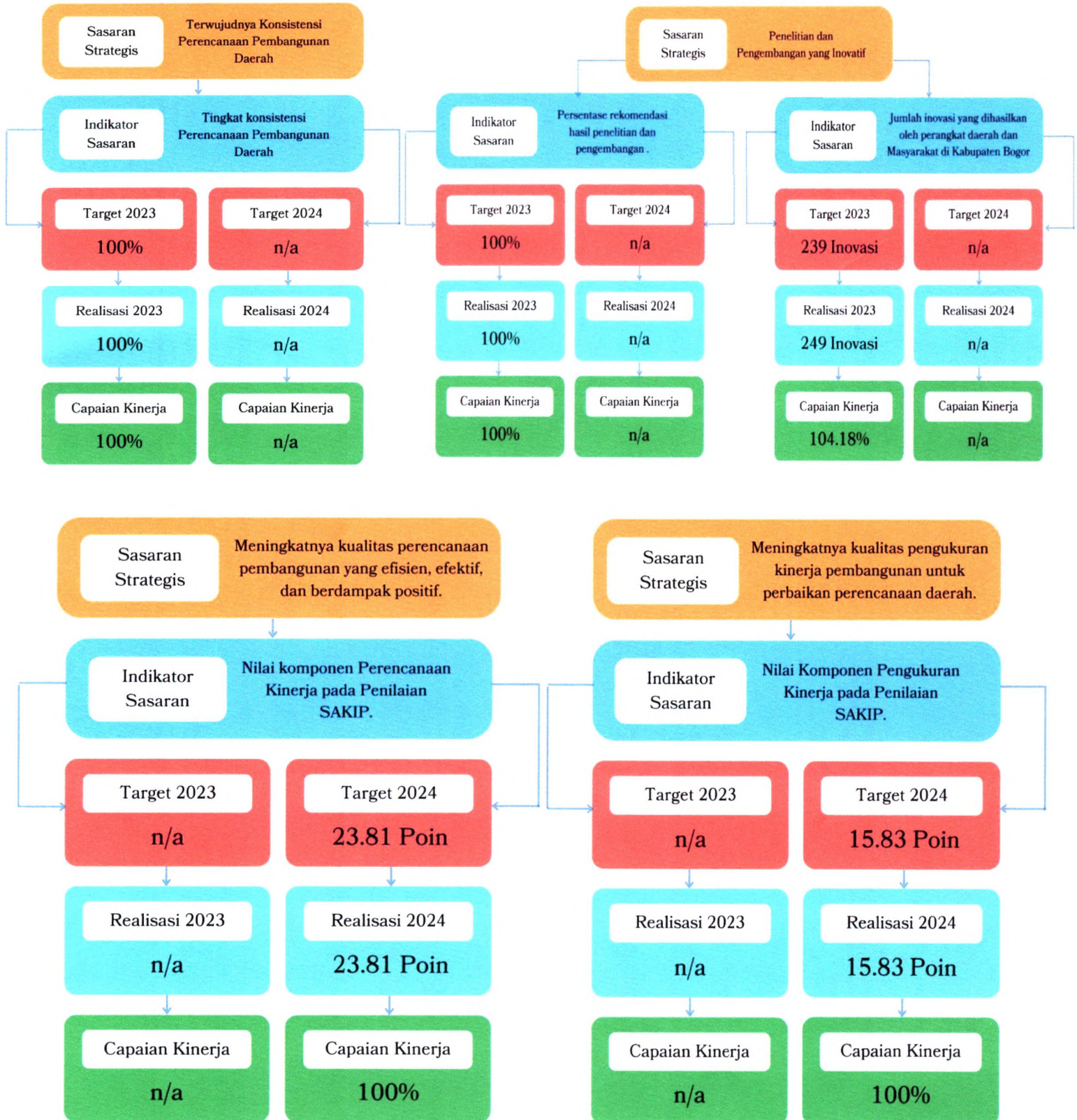
Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 menunjukkan nilai rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 100% dengan kriteria Penilaian Sangat Tinggi. Hal ini tentu saja merupakan Upaya semua pihak yang secara konsisten melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik. Disamping itu peran Masyarakat dan stakeholder lainnya dalam setiap tahapan aktifitas perencanaan daerah yang secara signifikan memberikan kontribusi positif dalam implementasinya.

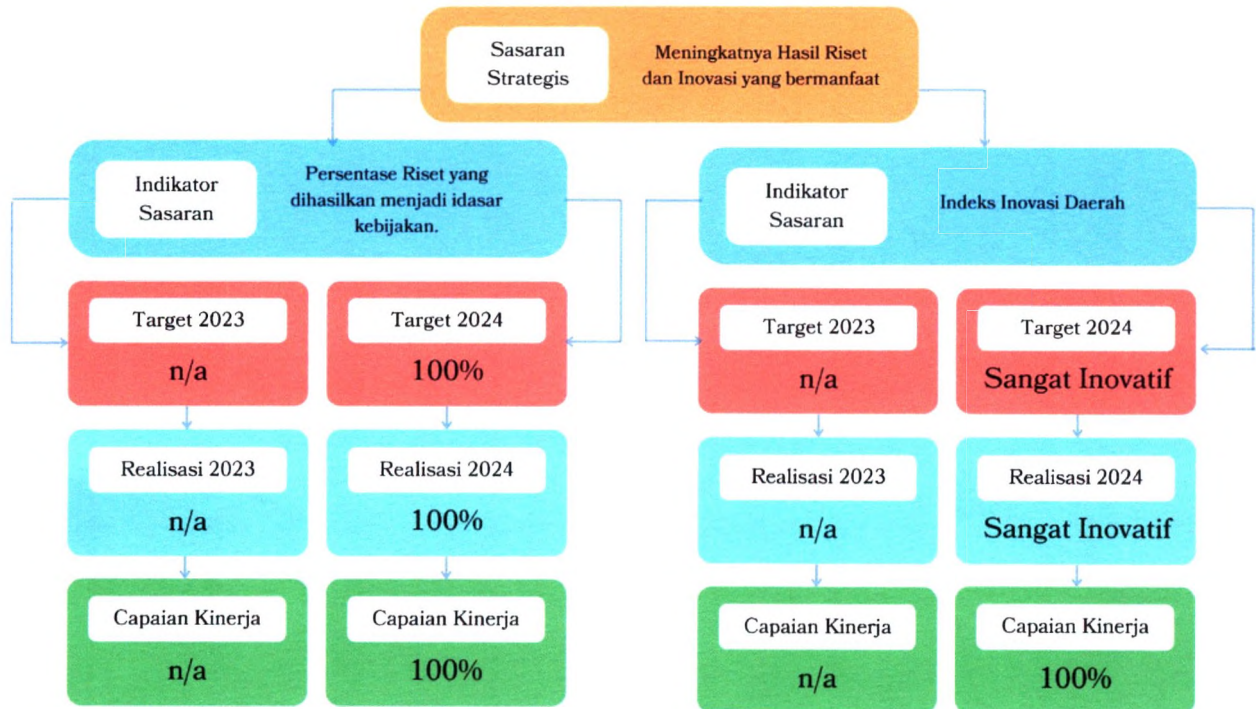
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Sekarang dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dengan tahun sebelumnya dapat di lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya





No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
Periode Renstra 2018-2023									
1	Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100%	n/a	n/a	n/a
2	Penelitian dan Pengembangan yang Inovatif	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan dalam kebijakan perencanaan Pembangunan daerah yang diakomodir	Persen	100	100	100%	n/a	n/a	n/a
		Jumlah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dan Masyarakat di Kabupaten Bogor	Inovasi	239	249	104.18%	n/a	n/a	n/a
Periode Renstra 2024-2026									
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang efisien, efektif dan berdampak positif ke masyarakat	Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	Poin	n/a	n/a	n/a	23.81	23.81	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam perbaikan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	Poin	n/a	n/a	n/a	15.83	15.83	100%
3	Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi yang bermanfaat	Persentase Riset yang dihasilkan menjadi idasar kebijakan	Persen	n/a	n/a	n/a	100	100	100%
		Indeks Inovasi Daerah	Predikat	n/a	n/a	n/a	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100%
Rata-rata Perbandingan Realisasi Kinerja									100%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2023 dan tahun 2024 terdapat perbedaan Sasaran Strategis sehingga terdapat perbedaan cara hitung maupun cara pencapaiannya. Untuk tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor mengacu kepada dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra-P) Periode 2018-2023 dengan indikator kinerja utama **Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah** didukung dengan indikator Tingkat konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target 100% yang tingkat realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2023 sebesar 100%.

Sedangkan pada tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor berpedoman kepada Dokumen Perubahan Renstra Periode Tahun 2024-2026 yang mengacu dari dokumen Perubahan - RPD Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026. Sehingga untuk Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2024 mengacu kepada **Kualitas Perencanaan dan Pengukuran** pada komponen Penilaian SAKIP dengan nilai Tingkat capaian Kinerja masing-masing komponen sebesar 100%.

Untuk perhitungan Indikator Kinerja Penelitian dan Pengembangan yang Inovatif pada Tahun 2023 dengan indikator sasaran **Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan dalam kebijakan perencanaan Pembangunan daerah yang diakomodir dan Jumlah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dan Masyarakat di Kabupaten Bogor** keduanya mendapatkan hasil realisasi sebesar 100% sehingga Tingkat capaian realisasi Indikator Kinerja Utama pada tahun 2023 sebesar 100%.

Sedangkan untuk perhitungan pada tahun 2024 terdapat perbedaan pedoman dan cara hitung dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Pada data tabel di atas bahwa sasaran **Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi yang bermanfaat** memiliki 2 sasaran, dengan sasaran yang pertama yaitu **Persentase Riset yang dihasilkan menjadi idasar kebijakan** dengan capaian Tingkat realisasi sebesar 100% dan untuk sasaran yang kedua yaitu Indeks Inovasi Daerah dengan target sangat inovatif dan realisasi yang dicapai yaitu dengan predikat Sangat Inovatif sehingga Tingkat capaian kinerja untuk indikator kedua yaitu sebesar 100%.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Jangka Menengah Renstra

Perbandingan realisasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 dengan target akhir Periode Renstra dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Jangka Menengah Perencanaan Strategis (Renstra)



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target akhir Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Bogor adalah sebesar 96.22% dengan interpretasi kinerja Sangat Tinggi. hal ini menunjukkan bahwa Upaya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor untuk mencapai target akhir dari Rencana Strategis yang merujuk pada kinerja RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 diprediksi dapat terrealisasi dengan interpretasi Kinerja Sangat Tinggi. oleh karena itu Upaya akselerasi pencapaian target kienrja di tahun berikutnya perlu dilakukan secara konsisten dan maksimal agar seluruh target akhir Pembangunan daerah di tahun 2026 baik untuk Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor sendiri maupun target kienrja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor secara keseluruhan dapat terrealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.1.4 Perbandingan Kinerja dengan Skala Nasional/Provinsi

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor apabila dibandingkan dengan Standar Nasional/RPJMN belum dapat dibandingkan dengan capaian rata-rata Nasional dikarenakan indikator tersebut tidak disajikan/dipublikasikan oleh Kemenpan RB mengenai rata-rata Nasionalnya. Sedangkan untuk capaian IKU Provinsi Jawa Barat nilai capaian IKU Bappeda Provinsi Jawa Barat Sebesar 26.32 Poin dari target 25.90 poin apabila dibandingkan dengan capaian IKU Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor yang memiliki nilai Capaian lebih rendah yaitu sebesar 23.81 poin sehingga memiliki selisih sebesar (2.51 poin).

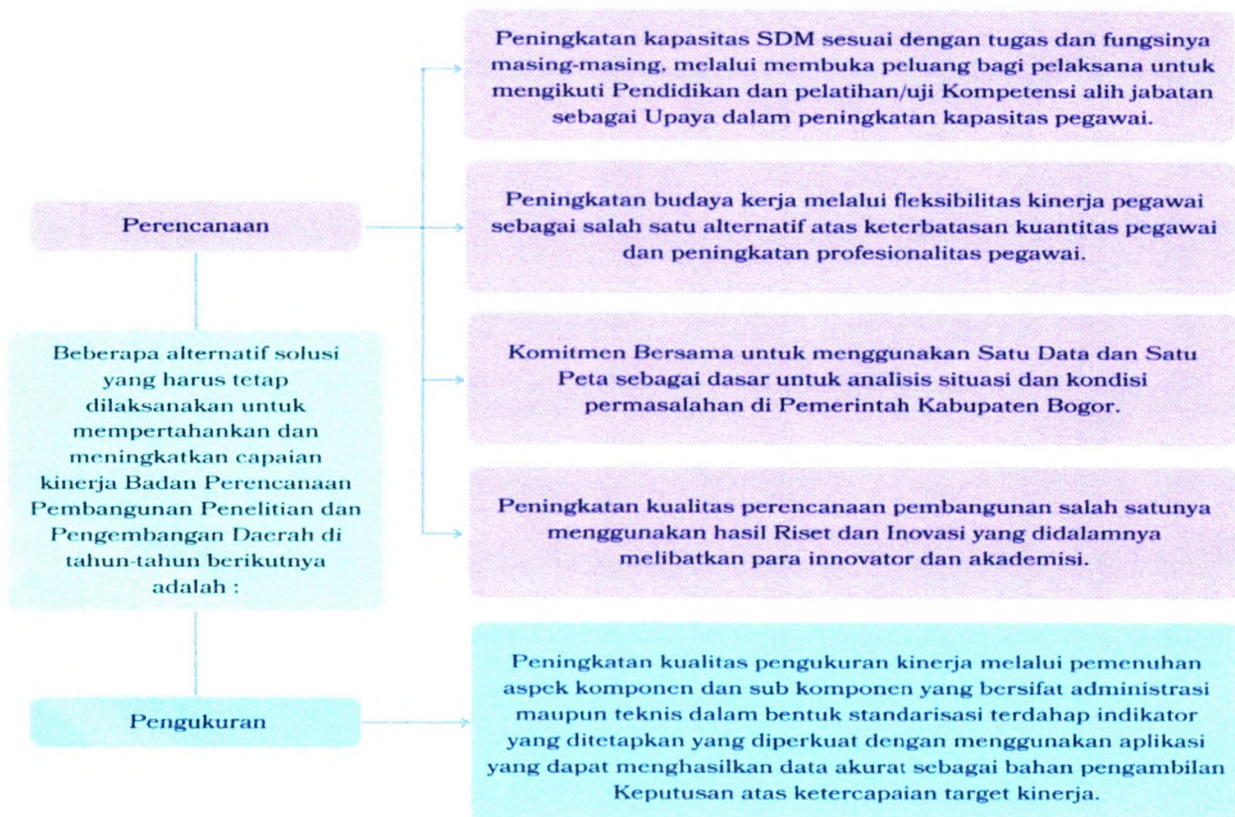
Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan
Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional



3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, rata-rata capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor pada Tahun 2024 sebesar 100% dengan interpretasi kinerja Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor serius serta konsisten dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Hal ini ditunjukkan adanya peningkatan target pada Tahun 2025 dan adanya perbaikan sasaran serta target pada tahun 2025 dikarenakan penyesuaian nomenklatur tugas pokok dan fungsi sebagaimana Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Perbaikan atau penyesuaian tersebut berada pada Bidang Penelitian dan Pengembangan, pada tahun 2024 bidang Penelitian dan Pengembangan mengampu IKU Bappedalitbang Kabupaten Bogor yaitu **Persentase Riset yang dihasilkan menjadi dasar kebijakan** namun berubah menjadi **Kebijakan hasil riset yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah** sehingga ada perbedaan cara pengukuran dan target pencapaian untuk Tahun 2025. Beberapa alternatif solusi yang harus tetap dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Bogor di tahun-tahun berikutnya adalah:



Tabel 3.6
Analisis Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Tahun 2025

<p>Sasaran</p> <p>Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif, dan berdampak positif bagi masyarakat.</p>		<p>Sasaran</p> <p>Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan untuk perbaikan perencanaan daerah.</p>	
<p>Indikator</p> <p>Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP</p>		<p>Indikator</p> <p>Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP</p>	
Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target 2025	Rekomendasi Perubahan Target 2025	Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target 2025	Rekomendasi Perubahan Target 2025
0.10 Poin	-	2.40 Poin	-
Target 2024: 23.81 Poin	Target 2025: 23.91 Poin	Target 2024: 15.83 Poin	Target 2025: 17.43 Poin

<p>Sasaran</p> <p>Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi yang bermanfaat</p>		
<p>Indikator</p> <p>Persentase Riset yang dihasilkan menjadi dasar kebijakan</p>	<p>Indikator</p> <p>Kebijakan hasil riset yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p>	<p>Indikator</p> <p>Indeks Inovasi Daerah</p>
Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target 2025	Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target 2025	Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target 2025
n/a	1 Kebijakan	Sangat Inovatif
Rekomendasi Perubahan Target 2025	Rekomendasi Perubahan Target 2025	Rekomendasi Perubahan Target 2025
Riset dan Inovasi yang dilaksanakan berorientasi secara THIS	-	-
Target 2024: 100%	Target 2024: n/a	Target 2024: Sangat Inovatif
Target 2025: n/a	Target 2025: 1 Kebijakan	Target 2025: Sangat Inovatif



Tabel 3.7
Perbandingan Target Program dengan Realisasi Capaian Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Program	Program	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
1	Perencanaan Pembangunan Daerah Berdampak pada Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Skala	4	4	100%
	Pengukuran Pembangunan daerah berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Skala	4	4	100%
2	Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Skala	4	4	100%
	Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Skala	4	4	100%
	Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Skala	4	4	100%
	Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Skala	4	4	100%
	Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Skala	4	4	100%
	Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Skala	4	4	100%
	Meningkatnya hasil Riset dan Inovasi yang bermanfaat	Persentase Riset yang dihasilkan Menjadi Dasar Perumusan Kebijakan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	100	100	100%



No	Sasaran Program	Indikator Program	Program	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
		Indeks Inovasi Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100%

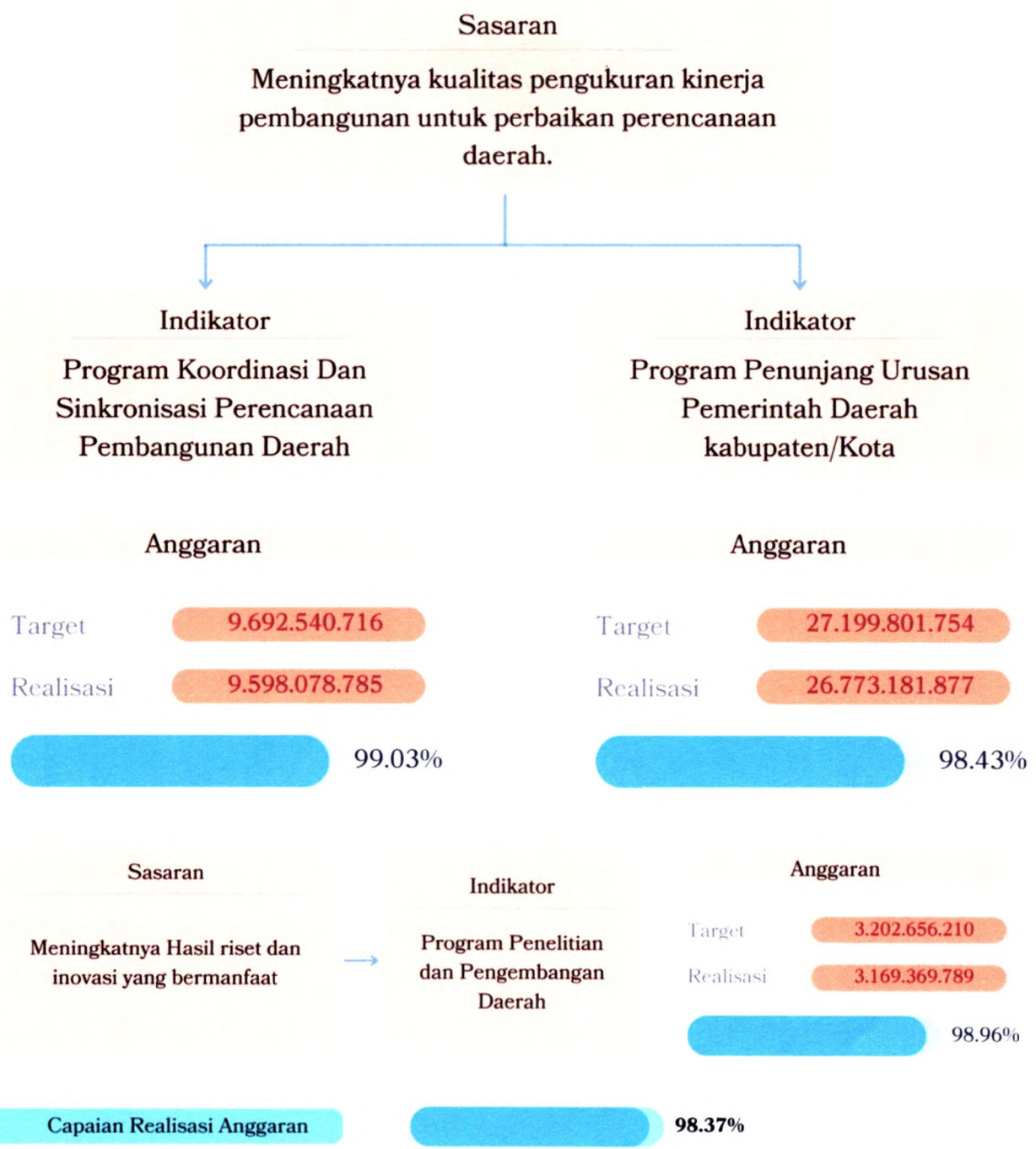
Berdasarkan tabel 3.7 diatas diketahui bahwa Tingkat Capaian masing-masing Program Utama untuk mendukung Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 memiliki realiasi sebesar 100% dengan interpretasi Kinerja Sangat Tinggi. hal ini menunjukkan bahwa Upaya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor untuk mencapai target pada Tahun 2024 dapat terrealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan menggunakan Anggaran APBD Kabupaten Bogor sebesar Rp. 42.782.098.802,00 atau sekitar 98.37% dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan sebesar 43.487.646.855,00 dengan interpretasi kinerja Sangat Tinggi. kemudia Realisasi Penggunaan Anggaran tersebut apabila dianalisis pencapaian kinerja anggarannya untuk setiap program dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024





Pada tabel 3.7 menampilkan realisasi anggaran masing-masing Program Utama untuk mendukung capaian Kinerja Perangkat Daerah. Seluruh Program Utama memiliki Realisasi Anggaran yang baik. Meskipun anggaran tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan.

Efisiensi anggaran pada Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar 4.46%, atau Rp. 151.179.823,00 dari anggaran sebesar Rp. 3.392.648.174,00 dan realisasinya sebesar 3.241.468.351,00 efisiensi tersebut ada pada 4 kegiatan yaitu kegiatan Penyusunan perencanaan dan Pendanaan, Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan

pelaporan dan Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah didalamnya terdapat efisiensi dari belanja pengadaan, barang dan jasa.

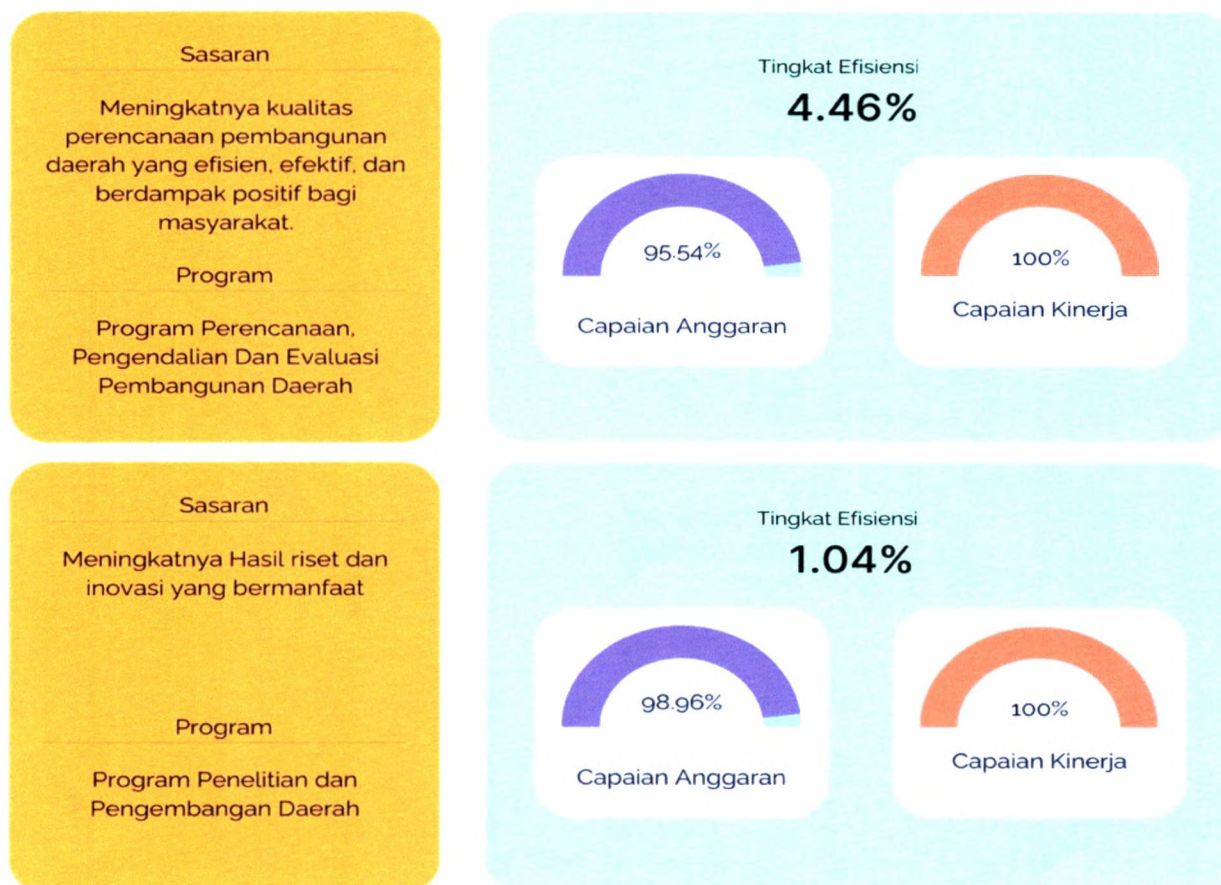
Efisiensi anggaran selanjutnya pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembanugnan Daerah sebesar 0.97% atau sebesar Rp. 94.461.931,00 dari anggaran sebesar Rp. 9.692.540.716 dan realisasinya sebesar Rp. 9.598.078.785 efisiensi tersebut ada pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Manusia, kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Efisiensi dari kegitiga kegiatan tersebut terdapat pada belanja honorarium Narasumber dan moderator, belanja jasa honorarium, pengadaan, makan minum dan perjalanan dinas.

Efisiensi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 1.57% atau Rp. 426.619.877,00 dari anggaran sebesar Rp. 27.199.801.754 dan realisasinya sebesar Rp. 26.773.181.877 efisiensi tersebut ada pada 8 (delapan) Kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Efisiensi dari delapan kegiatan tersebut terdapat pada belanja pengadaan dan belanja jamuan makan dan minum serta efisiensi belanja barang dan jasa.

Efisiensi anggaran selanjutnya pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar 1.04% atau Rp. 33.286.421 dari anggaran sebesar Rp. 3.202.656.210 dan realisasi sebesar Rp. 3.169.369.789,00 efisiensi terdaot pada 4 (empat) kegiatan yaitu Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Efisiensi terdapat pada belanja honorasium narasumber dan moderator, pengadaan, jamuan makan dan minum serta efisiensi belanja barang dan jasa.

Selanjutnya Tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Indikator Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024





Sasaran

Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan untuk perbaikan perencanaan daerah.

Program

Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota



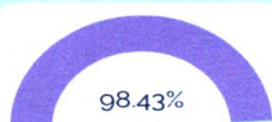
Capaian Anggaran



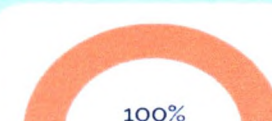
Capaian Kinerja

Tingkat Efisiensi

0.97%



Capaian Anggaran



Capaian Kinerja

Tingkat Efisiensi

1.57%

No	Sasaran	Program	Anggaran		
			Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efisien, Efektif dan berdampak Positif ke masyarakat	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	95.54	4.46
	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	99.03	0.97
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	100	98.43	1.57
	Meningkatnya Hasil riset dan inovasi yang bermanfaat	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	100	98.96	1.04
Capaian Tingkat Efisiensi			100	98.37	1.63



Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah sebesar 1.63%. hal ini menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan efisiensi anggaran sebesar 1.63% yang tergambarkan dalam pencapaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan selama Tahun 2024 dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan serta dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

3.1.7 Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk mendukung/menunjang Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Bogor, didukung oleh kinerja dari masing-masing Bidang sebagai pengampu dari Sasaran Daerah, Sasaran Perangkat Daerah maupun sasaran Program Perangkat Daerah ataupun Kegiatan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang cukup berdampak pada pencapaian target di antaranya:

1. Program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1.1 Penanganan Stunting Pelaksanaan Aksi Konyergensi di Kabupaten Bogor Tahun 2024

Data E-PPGMB mencatat hasil penimbangan terhadap angka Stunting pada periode Juni 2023 dengan persentase D/S 85.13% dari jumlah total balita ditimbang 466.508 balita dan jumlah Stunting 6.231 dengan prevalensi stuntingnya 1.59% dibandingkan dengan setelah intervensi Tahun 2024 terjadi kenaikan dengan persentase penimbangan D/S 98.21% dari jumlah total balita ditimbang 420.935 balita dan jumlah Stunting 6.955 dengan prevalensi Stunting 1.69% hal ini dimungkinkan terjadi kenaikan karena kenaikan juga terhadap persentase D/S.

a. Bentuk Perencanaan dan Koordinasi Antar Sektor dilakukan dalam Aksi Kovergensi

Penanganan Penurunan Stunting Kabupaten Bogor ditetapkan melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor: 444/195/Kpts/Per-UU/2022 tentang

Penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bogor, terdapat 15 OPD terkait diantaranya: Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Bappedalitbang, DPUPR, Dinas Pendidikan, Distanhorbun, Dinas Sosial, DPKPP, DPMD, Diskominfo, DLH, Disdukcapil, DKP, Diskanak, Kemenag. Penjaringan perencanaan melalui Rembuk Stunting merupakan salah satu Langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan. Intervensi pencegahan dan penurunan Stunting dilakukan secara terintegrasi di beberapa Perangkat Daerah penanggung jawab layanan, Lembaga non pemerintah dan masyarakat serta untuk memperkuat komitmen pimpinan daerah terhadap upaya percepatan penurunan Stunting , secara bersama-sama melakukan konfirmasi, sinkronisasi dan sinergi Hasil Analisis Situasi dan Rancangan Kerja Kegiatan dari OPD penanggung Jawab dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan melalui musrenbang kecamatan dan kelurahan, sehingga rembuk Stunting menjadi salah satu sarana konsolidasi lintas sector yang lebih luas dan dapat dilakukan disetiap level pemangku kepentingan.

b. Kendala Utama/Hambatan yang dihadapi

Target tidak tercapai banyak factor baik secara internal kelembagaan TPPS maupun factor sasaran yang ada pada Masyarakat, penyebab dari factor internal antara lain:

1. Secara kelembagaan, TPPS dikecamatan dan desa sudah dibentuk, namun perlu peningkatan peran dan fungsi dalam program penurunan stunting;
2. Kegiatan rembuk stunting di desa dan di kecamatan Sebagian sudah dilaksanakan namun belum optimal dalam menggali potensi sumber daya yang ada dalam konvergensi perencanaan dan aksi program penurunan stunting;
3. Pemanfaatan anggran dana desa sudah ada, namun tidak difokuskan pada program pencegahan stunting termasuk kegiatan peningkatan keterampilan kader dalam penentuan pertumbuhan balita dan pemeliharaan sarana antropometri.

Sedangkan dari penyebab dari factor eksternal antara lain:

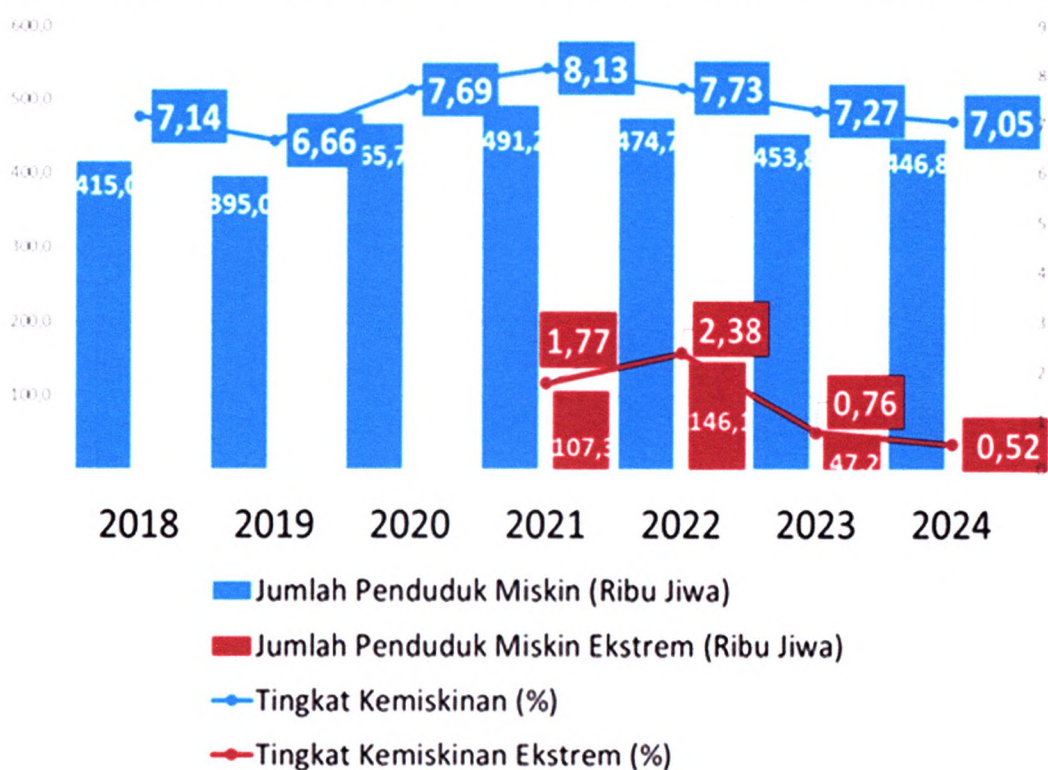
1. Kejadian kurang gizi disebabkan karena pemahaman orang tua yang rendah serta pola asuh gizi yang keliru, tidak IMD, tidak asi eksklusif, dan pemberian MP-ASI yang tidak adekuat;

2. Masih ada balita yang tidak datang ke posyandu atau tidak dipantau pertumbuhannya;
3. Keterampilan kader dalam mengukur dan menimbang balita masih belum mereta;
4. Tidak semua posyandu melakukan kegiatan sweeping atau kunjungan rumah terhadap balita yang tidak datang ke posyandu;
5. Belum semua balita yang bermasalah gizi mendapat inetrvensi.

1.2 Gambaran Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals) adalah menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terdapat 17 (tujuh belas) tujuan dalam SDGs, dimana salah satunya berfokus pada pengentasan kemiskinan yakni Tujuan utamanya Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.

Persentase penduduk Kabupaten Bogor miskin tahun 2024 sebesar 7,05 %, mengalami penurunan dibanding tahun 2023, dari yang semula 7,27 % di tahun 2023 menjadi 7,05 % di tahun 2024. Jika dibandingkan Provinsi Jawa Barat, persentase penduduk miskin

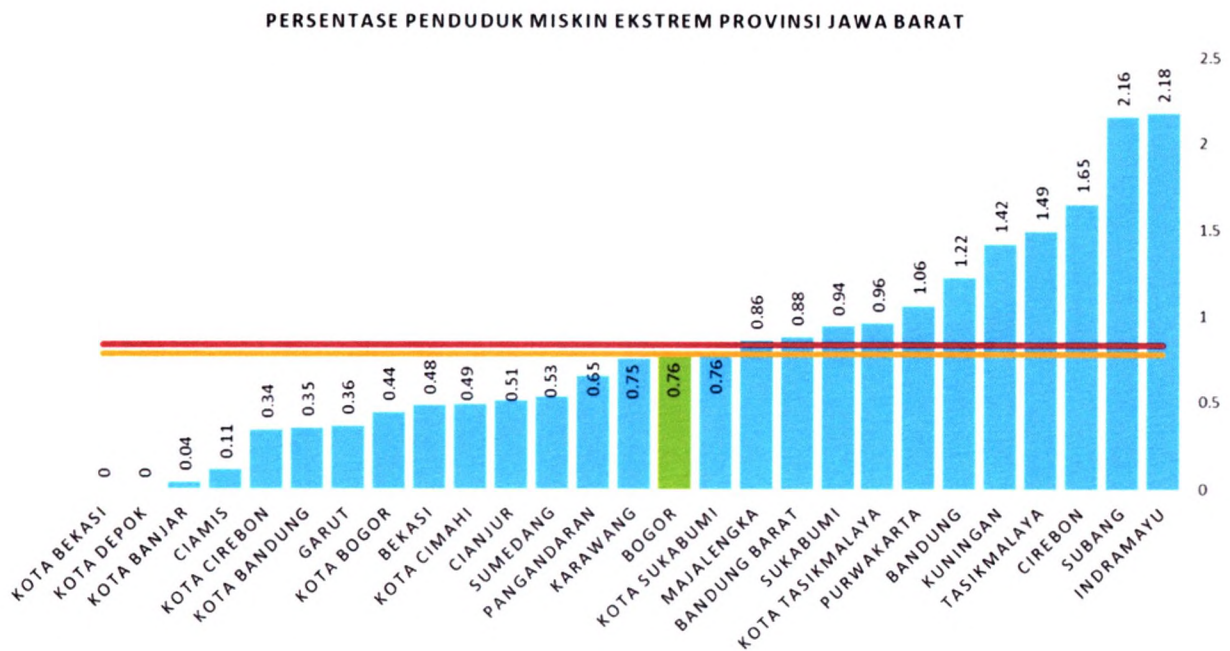


Kabupaten Bogor masih lebih rendah dibanding rata-rata provinsi Jawa Barat tahun 2024 sebesar 7,46%.

Sumber: BPS Kabupaten Bogor (2024); Kemenko PMK (2024)

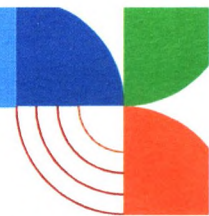
Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dia anggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu daerah. Garis Kemiskinan umum di Kabupaten Bogor Rp. 513.512/ kapita/ bulan sedangkan garis kemiskinan ekstrem Rp.351.957 / kapita/ bulan.

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (purchasing power parity). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Berdasarkan data persentase penduduk miskin ekstrem,



Sumber: BPS Kabupaten Bogor 2024 Kemenko PMK 2024, diolah

Berdasarkan data proyeksi BPS 2023 kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bogor sebesar 0,76% (47.220 jiwa), Sedangkan bila di dilihat dalam data sasaran P3KE Tahun 2024, jumlah penduduk miskin ekstrem berada pada persentil 1 dan 2 sebesar (64.471 jiwa) dan jumlah penduduk miskin berada pada desil 1 (581.298 jiwa).



Berdasarkan data sasaran P3KE Tahun 2024, persentase Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bogor sebesar 0,76% lebih rendah dari Nasional sebesar 0,83% dan Provinsi Jawa Barat 0,78%.

Komitmen pemerintah terhadap penurunan kemiskinan ditandai dengan masuknya tema kemiskinan menjadi RB tematik dan disahkannya Inpres Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan terkait pengentasan kemiskinan. Kebijakan pengentasan kemiskinan dalam Inpres no. 4 Tahun 2022 mengamanatkan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah republik Indonesia pada tahun 2024 (persentase kemiskinan ekstrem sebesar 0%).

Sesuai dengan Pasal 13 Permendagri 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, TKPK kabupaten/kota mempunyai tugas menyusun RPKD, RAT dan LPPK. RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 tahun yang juga merupakan bagian dari RPJMD.

Komitmen pemerintah Kabupaten Bogor dalam memberantas kemiskinan tertuang dalam sasaran pokok RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yakni Indikator Kinerja Utama “Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator makro daerah yang juga digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai kinerja utama daerah. Sebagai upaya untuk melaksanakan misi perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, tingkat kemiskinan merupakan representasi dari sasaran daerah untuk meningkatkan kesejahteraan”. Sasaran pokok ini fokus pada peningkatan kondisi sosial dan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan ketimpangan pendapatan sehingga dapat menurunkan kemiskinan Kabupaten Bogor, dengan indikator tujuan atau IKU persentase penduduk miskin. Berikut merupakan target dan Persentase penduduk miskin dalam RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.



Tabel 3.10 Target dan Realisasi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bogor



Kendala Utama/hambatan yang dihadapi antara lain:

- a. Dari penilaian pemeriksaan Itjen Kemendagri disampaikan bahwa Kabupaten Bogor belum memiliki data Jumlah Penduduk Miskin yang telah menerima bantuan yang bersumber dari APBD 2024;
- b. Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024 belum melakukan pemutakhiran BNBA berdasarkan NIK yang berakibat tidak adanya dokumen menjadi acuan melakukan intervensi penghapusan kemiskinan.

2. Program dan Kegiatan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang cukup berdampak pada pencapaian target diantaranya:

2.1 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang adalah Upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang adalah Upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pelaksanaan pemanfaatan ruang merupakan pelaksanaan Pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh Masyarakat, yang harus mengacu pada rencana tata ruang. Salah satu

kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja secara signifikan adalah:

- A. Tersedianya visi Pembangunan Kawasan perkotaan Cibinong Raya sebagai ibukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan Lokal melalui Penyusunan Cetak Biru Pengembangan Perkotaan Terintegrasi Kawasan Cibinong Raya. Dokumen ini disusun sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam menentukan arah pengembangan Kawasan Cibinong Raya yang memuat visi jangka Panjang, prioritas tahap Pembangunan yang berkelanjutan hingga perencanaan dan perancangan Pembangunan Kawasan yang potensial.
- B. Tersedianya dokumen RISPAM sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam pengusulan program DAK dan Pamsimas serta program APBN regular untuk Perumda tirta Kahuripan, dan untuk mengetahui kebutuhan air minum di Kabupaten Bogor di masa yang akan datang sehingga dijadikan dasar dalam perencanaan pengembangai air minum di Kabupaten Bogor juga sebagai salah satu *Readiness Criteria* dalam pengusulan program air minum di pusat dan provinsi.
- C. Tersinergikannya arah implementasi perencanaan Proyek Prioritas Nasional/Strategis/Major Project termasuk di dalamnya Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor maka perlu disediakan acuan dokumen rencanan tindak implementasi Pembangunan yang mengatur Lokasi, desain, penataan dan tahapan Pembangunan maka disusun beberapa dokumen perencanaan implementasi yang terdiri atas:
 1. Penyusunan Desain Penataan Kawasan Pemukiman yangn terdampak Rencana Waduk Cibeet (Nasional) yang dilakukan untuk mengatur pola relokasi penduduk yang terdampak Rencana Waduk Cibeet melalui identifikasi permukiman yang terdampak, identifikasi kelompok rentan, penentuan rencana penyiapan Kawasan permukiman yang layak, rancangan penataan lahan permukiman serta tahapan Pembangunan;
 2. Penyusunan Konsep Desain Penataan Koridor Jalur Puncak Pasca Penertiban PKL/Bangunan Liar (Nasional) dilakukan untuk melakukan sinkronisasi aspirasi daerah sebagai bahan perancangan Lokasi-lokasi penataan di sepanjang koridor puncak. Dokumen ini memuat identifikasi lahan-lahan potensial yang akan

- dimanfaatkan, konsultasi dan aspirasi Masyarakat dan stakeholder setempat terkait penataan puncak serta sinkronisasi kebijakan pemanfaatan lahan dan lingkungan di wilayah puncak;
3. Penyusunan Desai Penataan Kawasan di sekitar Jalan Tambang (Provinsi) yang dilakukan untuk memetakan permasalahan kondisi dan Kawasan di sepanjang Rencana Jalan Tambang melalui penataan Kawasan, perkiraan dampak Pembangunan dan pemodelan transportasi juga dilakukan untuk memberikan bahan perencanaan Pembangunan jalan Tambang;
 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jalan Baru yang dilakukan untuk memberikan alternatif-alternatif Pembangunan jalan baru sehingga salah satu Upaya dalam menyelesaikan permasalahan kemacetan serta membuka perkembangan Kawasan baru.
- D. tersingergikannya dokumen rencana Pembangunan daerah rencana tata ruang wilayah melalui Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Program Penataan Ruang (SPPR) 5 Tahunan. Sinkronisasi Dokumen rencana Pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Pembangunan yang terintegrasi, meningkatkan ketahanan lingkungan dan mitigasi risiko bencana, mendukung investasi dan pengembangan ekonomi, membantu prioritas infrastruktur dan Pelayanan Publik serta meningkatkan kualitas hidup Masyarakat.
- E. Tersedianya pedoman operasional pemanfaatan ruang melalui Penyusunan Dokumen Petunjuk Teknis Ketentuan Umum Peraturan Zonasi yang merupakan turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah yang berfungsi sebagai pedoman perwujudan struktur dan pola ruang wilayah.

3. Program dan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang cukup berdampak pada pencapaian Target diantaranya:

3.1 Indeks Inovasi Daerah

Inovasi daerah merupakan faktor penting yang mendorong instansi untuk meningkatkan kinerjanya. Implementasi inovasi daerah telah mengalami beberapa perubahan terutama sebagai respon atas dinamika kebijakan, perkembangan teknologi, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Perubahan ini mencakup penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik, optimalisasi sumber daya lokal, serta penguatan kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, dan akademisi. Selain itu,

inovasi daerah juga berkembang sebagai respons terhadap tantangan global, seperti perubahan iklim dan krisis ekonomi, yang mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan solusi berbasis kearifan lokal dan teknologi terkini. Dengan implementasi yang adaptif dan berkelanjutan, inovasi daerah dapat meningkatkan efisiensi layanan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat daya saing wilayah.

Berdasarkan penjelasan di atas terkait kedudukan penting inovasi daerah, maka Bappedalitbang menetapkan inovasi daerah sebagai salah satu IKU instansi yaitu pada indeks inovasi daerah. Langkah-langkah Bappedalitbang dalam mencapai target pada indikator tersebut diimplementasikan pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dan sub kegiatan yang terdiri dari Temu Inovator, Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, Innovation Goes to School/Campus, Gelar Inovasi Daerah, Duta Inovasi Desa, Difusi Inovasi dan Teknologi.

Tabel 4. Jumlah Inovasi Daerah Per Kategori yang Dilaporkan ke Kemendagri Tahun 2024

NO	Kategori	Jumlah
1	Perangkat Daerah (Dinas/Badan)	44
2	Kecamatan	58
3	Puskesmas	128
Jumlah		230

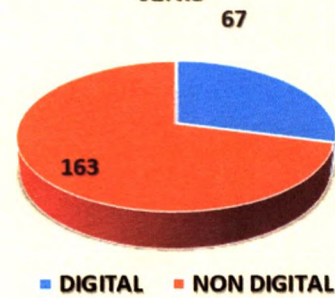
Ket. Data Inovasi Kabupaten Bogor Tahun 2024 Diolah

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian jumlah inovasi daerah di Kabupaten Bogor sebanyak 230 yang terdiri dari 44 inovasi pada perangkat daerah (dinas/badan), 58 inovasi pada kecamatan, dan 128 inovasi pada puskesmas yang dilaporkan ke Kemendagri pada tahun 2024. Adapun rincian jumlah inovasi berdasarkan bentuk dan jenis inovasi tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

JUMLAH INOVASI BERDASARKAN BENTUK



JUMLAH INOVASI BERDASARKAN JENIS



Gambar. Jumlah Inovasi Berdasarkan Bentuk dan Jenis Tahun 2024

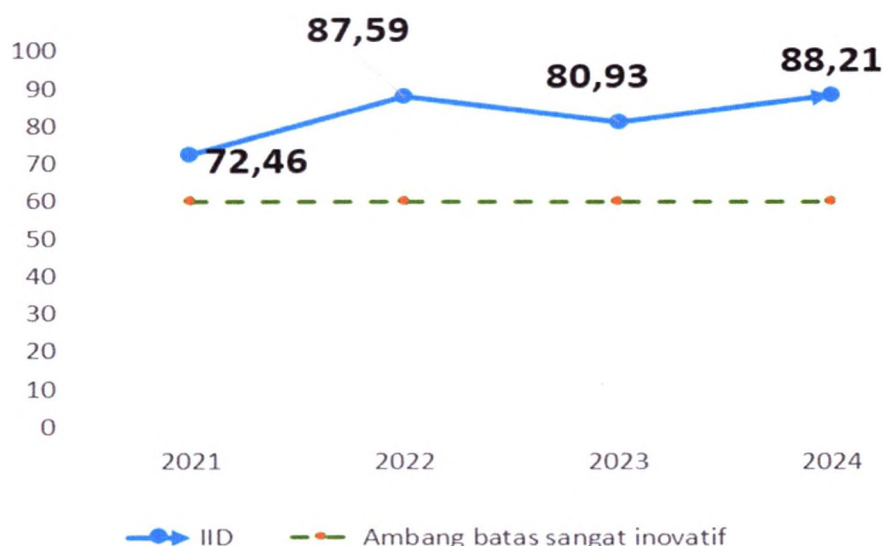
Dari Gambar diatas diketahui terdapat 230 inovasi yang terdiri dari 20 inovasi tata kelola, 163 inovasi pelayanan publik dan 47 inovasi lainnya. Selanjutnya, dilihat dari jenis inovasi terbagi menjadi 67 inovasi digital dan 163 inovasi non digital. Data tersebut menunjukkan fokus utama inovasi pada tahun 2024 cenderung terletak pada pelayanan publik dengan penekanan yang kuat pada pengembangan non-digital. Hal ini dapat mencerminkan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas layanan secara langsung kepada masyarakat. Sementara itu, tantangan dalam mengembangkan inovasi digital perlu diatasi agar dapat lebih sejalan dengan tren global yang mengarah ke digitalisasi.

JUMLAH INOVASI BERDASARKAN URUSAN



Gambar. Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Tahun 2024

Gambar diatas menjelaskan jumlah inovasi berdasarkan urusandi Kabupaten Bogor dengan sektor kesehatan mendominasi sebanyak 146 inovasi, jauh melampaui urusan lain. Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah berada di posisi kedua dengan 20 inovasi, diikuti oleh lingkungan hidup dengan 18 inovasi. Administrasi kependudukan menyumbang 10 inovasi, sementara penelitian dan pengembangan berkontribusi sebanyak 6 inovasi. Urusan lain seperti fungsi penunjang lainnya (5 inovasi), keuangan, pendidikan, sosial, komunikasi, dan pertanian hanya memiliki 1 hingga 3 inovasi. Beberapa urusan lain seperti ketenagakerjaan, pertahanan, dan perencanaan masing-masing hanya menghasilkan 1 inovasi. Data



tersebut menunjukkan bahwa inovasi daerah mencerminkan prioritas utama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Dominasi inovasi pada sektor ini dapat dipengaruhi oleh kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kualitas kesehatan. Sektor koperasi dan lingkungan hidup juga menunjukkan perhatian yang signifikan terutama terkait dengan dorongan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. Namun, rendahnya jumlah inovasi pada sektor lain, seperti pendidikan dan sosial, mengindikasikan adanya potensi pengembangan yang belum dimaksimalkan. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih seimbang untuk mendorong inovasi di sektor-sektor yang kurang terfokus agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Gambar. Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bogor 2021-2024

Realisasi jumlah inovasi di Kabupaten Bogor tersebut di atas juga diukur berdasarkan hasil inovasi dalam tahap penerapannya (tingkat kematangan inovasi) dengan standar pengukuran Indeks Inovasi Daerah dari Kemendagri RI dengan capaiannya sangat baik dan progresif, ditunjukkan dengan kenaikan Indeks Inovasi Daerah yang cukup signifikan pada kurun 2024 dengan skor 88,21 poin dan predikat sangat inovatif.

Tabel 3.11 Rekapitulasi Sebaran Kematangan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024

Indikator	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Tidak Terisi/Tidak Sesuai
Regulasi Inovasi Daerah	14,80%	1,30%	83,00%	0,90%
Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	0,40%	-	98,70%	0,90%
Dukungan Anggaran	0,40%	9,60%	89,60%	0,40%
Alat Kerja	55,70%	1,70%	40,90%	1,70%
Bimtek Inovasi	-	0,90%	98,30%	0,90%
Integrasi Program dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	91,70%	2,20%	4,30%	1,70%
Jejaring Inovasi	2,20%	-	96,50%	1,30%
Replikasi	2,20%	-	84,30%	15,70%
Pedoman Teknis	0,40%	-	96,70%	3,90%
Pelaksanaan Inovasi Daerah	7,80%	45,70%	45,20%	1,30%
Kemudahan Informasi Layanan	0,90%	4,30%	92,60%	2,20%
Penyelesaian Layanan Pengaduan	3,90%	5,2%	87,0%	3,90%
Keterlibatan Aktor Inovasi	68,30%	13,00%	14,80%	3,90%
Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan	0,90%	-	97,40%	1,70%
Layanan Terintegrasi	10,00%	42,60%	45,70%	1,70%
Kecepatan Penciptaan Inovasi	0,40%	-	99,10%	0,40%
Kemanfaatan Inovasi	0,90%	0,40%	97,80%	0,90%
Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	7,4%	-	91,70%	0,90%
Sosialisasi Inovasi Daerah	-	0,40%	98,30%	1,30%
Kualitas Inovasi Daerah	22,20%	46,10%	31,70%	-

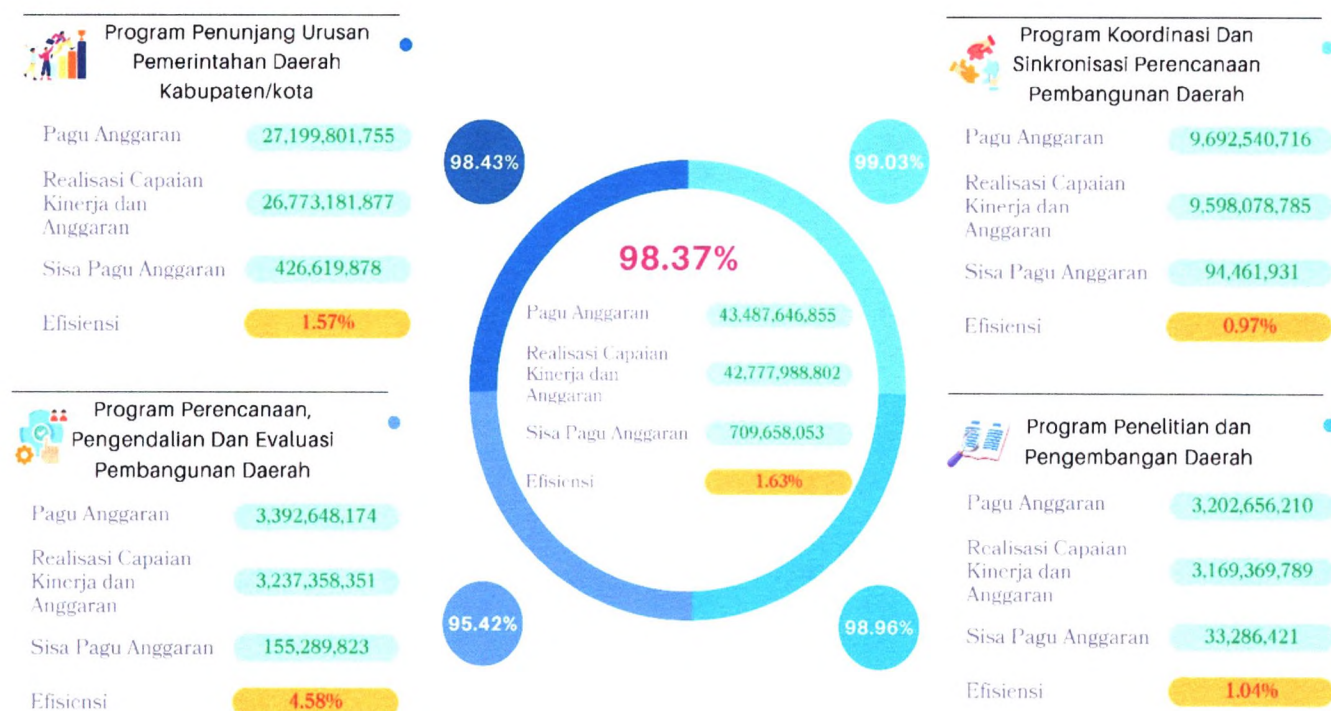
Tingkat kematangan inovasi tertinggi (parameter 3) mengalami peningkatan signifikan dari 65,67% pada tahun 2023 menjadi 74,63% pada tahun 2024 yang menggambarkan progres positif dalam pengembangan dan penerapan inovasi di Kabupaten Bogor. Dari Tabel 5. diketahui bahwa data rekapitulasi sebaran kematangan inovasi daerah Kabupaten Bogor tahun 2024 menunjukkan capaian yang signifikan pada parameter 3 (tingkat kematangan tertinggi), terutama

dalam aspek kecepatan penciptaan inovasi (99,10%), ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah (98,70%), bimtek inovasi (98,30%), sosialisasi inovasi daerah (98,30%), kemanfaatan inovasi (97,80%), dan kemudahan proses inovasi yang dihasilkan (97,40%). Hal ini mencerminkan kesiapan daerah dalam mengelola dan menerapkan inovasi secara optimal, terutama dalam menyediakan sumber daya manusia yang kompeten, pendampingan teknis, dan proses inovasi yang efisien. Namun, beberapa indikator masih menunjukkan ruang perbaikan, seperti pada integrasi dalam RKPD (4,30%) dan keterlibatan aktor inovasi (14,80). Rendahnya proporsi pada parameter tidak terisi/tidak sesuai di hampir semua indikator (rata-rata di bawah 4%) menunjukkan bahwa sistem inovasi telah berjalan cukup efektif, meskipun masih diperlukan peningkatan integrasi program dan kualitas inovasi daerah untuk menciptakan dampak yang lebih merata dan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Kabupaten Bogor telah berhasil mencapai target indikator indeks inovasi daerah dengan peringkat **sangat inovatif**. Hal ini mencerminkan komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan dan penerapan inovasi secara menyeluruh. Pencapaian ini ditunjang oleh berbagai program strategis yang diinisiasi oleh Bappedalitbang. Dengan pencapaian ini, Kabupaten Bogor berhasil menunjukkan bahwa inovasi daerah, baik digital maupun non-digital, dapat menjadi instrumen kunci untuk meningkatkan efisiensi, kualitas layanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.

3.2 Realisasi Anggaran

Sesuai dengan APBD Tahun Anggaran 2024, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor mengelola Anggaran sebesar Rp. 43.487.646.854,00 yang terrealisasi sebesar Rp. 42.782.098.802,00 atau sekitar 98.37%. dalam Penyelenggaraan Program Kegiatannya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor melaksanakan 4(empat) Program, 19 (sembilan belas) Kegiatan dan 87 (delapan puluh tujuh) Sub Kegiatan yang penyerapan anggarannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024

Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran	Sisa Pagu Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)
		Rp	Rp	Rp	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	27,199,801,755	26,773,181,877	426,619,878	98.43
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	432,346,530	418,483,500	13,863,030	96.79
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	121,939,178	118,684,675	3,254,503	97.33
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-skpd	20,217,447	18,309,000	1,908,447	90.56
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-skpd	18,409,587	17,354,000	1,055,587	94.27
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-skpd	21,984,744	20,609,000	1,375,744	93.74
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd	17,444,621	16,533,100	911,521	94.77
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	88,848,929	85,143,725	3,705,204	95.83
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143,502,024	141,850,000	1,652,024	98.85
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17,528,351,138	17,287,903,654	240,447,484	98.63

Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran	Sisa Pagu Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)
		Rp	Rp	Rp	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	17,441,309,825	17,204,815,984	236,493,841	98.64
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd	28,931,352	27,476,700	1,454,652	94.97
5.01.01.2.02.0004	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Skpd	7,733,823	7,233,070	500,753	93.53
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	23,326,121	22,695,500	630,621	97.30
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	27,050,017	25,682,400	1,367,617	94.94
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	23,823,428	23,222,600	600,828	97.48
5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd	7,371,534	7,224,700	146,834	98.01
5.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada Skpd	9,006,180	8,764,400	241,780	97.32
5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd	7,445,714	7,233,500	212,214	97.15
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	739,239,869	709,212,180	30,027,689	95.94
5.01.01.2.05.0003	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20,587,836	15,400,100	5,187,736	74.80
5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	48,932,467	48,012,500	919,967	98.12
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	127,427,555	123,335,100	4,092,455	96.79
5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	17,384,236	15,162,900	2,221,336	87.22
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	524,907,775	507,301,580	17,606,195	96.65
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,021,978,961	1,955,680,227	66,298,734	96.72
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	119,470,689	115,577,000	3,893,689	96.74
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	743,358,568	716,885,000	26,473,568	96.44
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	158,063,948	148,666,500	9,397,448	94.05
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91,005,960	88,414,600	2,591,360	97.15
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	172,787,820	162,349,800	10,438,020	93.96
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	69,255,000	57,330,000	11,925,000	82.78
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	505,942,054	505,934,877	7,177	100.00
5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	24,747,396	24,027,000	720,396	97.09
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	137,347,526	136,495,450	852,076	99.38
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	912,910,327	900,965,000	11,945,327	98.69
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	194,450,300	188,160,000	6,290,300	96.77
5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	718,460,027	712,805,000	5,655,027	99.21
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,916,165,132	1,867,624,280	48,540,852	97.47
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,600,000	5,600,000	-	100.00
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	827,135,718	782,982,830	44,152,888	94.66
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,083,429,414	1,079,041,450	4,387,964	99.59
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,624,986,370	3,610,090,436	14,895,934	99.59
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	246,255,000	235,517,606	10,737,394	95.64
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	134,043,800	132,708,000	1,335,800	99.00
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	2,956,879,330	2,956,879,330	-	100.00
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	40,626,000	38,911,700	1,714,300	95.78
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	247,182,240	246,073,800	1,108,440	99.55
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3,392,648,174	3,237,358,351	155,289,823	95.42
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan	2,529,462,489	2,394,111,916	135,350,573	94.65

Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran	Sisa Pagu Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)
		Rp	Rp	Rp	
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, Dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	621,458,045	585,724,300	35,733,745	94.25
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	524,643,422	474,651,268	49,992,154	90.47
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	37,755,062	37,170,500	584,562	98.45
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah	49,833,127	48,455,500	1,377,627	97.24
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/kota	457,236,328	453,811,234	3,425,094	99.25
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	155,072,007	147,371,300	7,700,707	95.03
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota	683,464,498	646,927,814	36,536,684	94.65
5.01.02.2.02	Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	348,840,101	341,918,025	6,922,076	98.02
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	348,840,101	341,918,025	6,922,076	98.02
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	322,659,215	317,146,626	5,512,589	98.29
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten/kota	251,628,187	248,394,826	3,233,361	98.72
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	71,031,028	68,751,800	2,279,228	96.79
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah	191,686,369	184,181,784	7,504,585	96.08
5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah	191,686,369	184,181,784	7,504,585	96.08
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	9,692,540,716	9,598,078,785	94,461,931	99.03
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	2,149,965,680	2,127,924,134	22,041,546	98.97
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd)	355,832,489	349,795,821	6,036,668	98.30
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30,734,083	29,616,000	1,118,083	96.36
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	35,359,630	34,373,000	986,630	97.21
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	102,500,714	100,846,500	1,654,214	98.39
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd)	1,026,828,650	1,020,759,634	6,069,016	99.41
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	36,219,074	34,911,000	1,308,074	96.39
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	76,118,454	75,165,784	952,670	98.75
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	486,372,586	482,456,395	3,916,191	99.19
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (sumber Daya Alam)	1,793,526,227	1,765,878,065	27,648,162	98.46
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd)	276,353,595	270,464,342	5,889,253	97.87
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	59,217,604	57,239,900	1,977,704	96.66

Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran	Sisa Pagu Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)
		Rp	Rp	Rp	
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	45,740,847	43,995,500	1,745,347	96.18
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1,047,206,472	1,036,176,655	11,029,817	98.95
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sda (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd)	223,987,999	221,613,768	2,374,231	98.94
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sda	64,255,878	61,947,400	2,308,478	96.41
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sda	44,275,914	43,083,900	1,192,014	97.31
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sda	32,487,918	31,356,600	1,131,318	96.52
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	5,749,048,809	5,704,276,586	44,772,223	99.22
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd)	1,314,483,180	1,304,306,934	10,176,246	99.23
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	37,490,380	35,700,000	1,790,380	95.22
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	46,248,529	45,668,500	580,029	98.75
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1,357,494,566	1,356,341,200	1,153,366	99.92
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd)	182,271,598	174,429,109	7,842,489	95.70
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	76,555,946	63,453,784	13,102,162	82.89
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	50,564,069	49,914,884	649,185	98.72
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2,683,940,541	2,674,462,175	9,478,366	99.65
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	3,202,656,210	3,169,369,789	33,286,421	98.96
5.05.02.2.01	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	99,959,925	98,127,000	1,832,925	98.17
5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru Dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	99,959,925	98,127,000	1,832,925	98.17
5.05.02.2.02	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	498,660,502	490,363,000	8,297,502	98.34
5.05.02.2.02.0001	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	498,660,502	490,363,000	8,297,502	98.34
5.05.02.2.03	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	2,110,033,887	2,097,973,984	12,059,903	99.43
5.05.02.2.03.0001	Penelitian Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	99,959,925	97,927,000	2,032,925	97.97
5.05.02.2.03.0003	Penelitian Dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	99,959,925	98,127,000	1,832,925	98.17
5.05.02.2.03.0004	Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan Dan Pangan	151,569,305	148,811,784	2,757,521	98.18
5.05.02.2.03.0011	Penelitian Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1,758,544,732	1,753,108,200	5,436,532	99.69
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	494,001,896	482,905,805	11,096,091	97.75
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, Dan Perekayasaan Di Bidang Teknologi Dan Inovasi	365,227,548	358,840,705	6,386,843	98.25
5.05.02.2.04.0002	Uji Coba Dan Penerapan Rancang Bangun/model Replikasi Dan Invensi Di Bidang Difusi Inovasi Dan Penerapan Teknologi	30,371,436	29,576,700	794,736	97.38



Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran	Sisa Pagu Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)
		Rp	Rp	Rp	
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur Dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	58,246,357	57,084,500	1,161,857	98.01
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi Dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	30,247,542	29,677,900	569,642	98.12
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	9,909,013	7,726,000	2,183,013	77.97
		43,487,646,855	42,777,988,802	709,658,053	98.37



Bab IV PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan strategis dalam mendukung terwujudnya Good Governance. Penyusunan LKIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur pelaporan pencapaian kinerja instansi pemerintah. Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Bappedalitbang Kabupaten Bogor dirumuskan melalui 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja utama Kepala Bappedalitbang dengan pencapaian 100% dengan interpretasi Kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan Capaian Kinerja Anggaran sebesar 98.37% dari jumlah Anggaran sebesar Rp. 43.487.646.855,00 dan realisasinya sebesar Rp. 42.777.988.802,00 dengan interpretasi Kinerja Sangat Tinggi. Hal ini apabila di cermati lebih lanjut Bappedalitbang dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tingkat efisiensi dengan tingkat menunjukkan angka 1.63%.

Proses penyusunan LKIP terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Proses ini mencakup pengumpulan data yang akurat, evaluasi kinerja, serta analisis akuntabilitas untuk memastikan laporan tersusun secara komprehensif. Keberhasilan pencapaian target indikator program dan kegiatan tidak terlepas dari kontribusi seluruh pihak yang terlibat. Keberhasilan tersebut mencerminkan berjalannya sistem kerja yang efektif, dinamis, dan sinergis di Bappedalitbang Kabupaten Bogor yang berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian target indikator dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dengan komitmen yang kuat dan optimalisasi kapasitas sumber daya yang dimiliki, Bappedalitbang berhasil memaksimalkan potensi untuk mendukung realisasi target indikator kinerja. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dijadikan sebagai isu strategis yang



harus diselesaikan bersama. Tantangan ini menjadi agenda prioritas yang perlu ditindaklanjuti secara kolaboratif oleh seluruh pihak.

4.2 Saran Perbaikan Kedepan / Rekomendasi

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut;

1. Mengotimalkan pola koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor selaku pengampu Perencanaan dengan Perangkat Daerah.
2. Reviu dan evaluasi target kinerja perangkat daerah mitra sebagai bagian dari pencapaian target sasaran daerah.
3. Meningkatkan kualitas pemantauan, pengukuran dan evaluasi kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Meningkatkan peran inovasi dan penelitian terhadap pencapaian target pembangunan daerah.
5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di Bappedalitbang Kabupaten Bogor, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.

Cibinong, Januari 2024

Pt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Bogor



Ir. SURYANTO PUTRA, M.Si
NIP. 196706261999011001

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) berdasarkan DPA	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026			Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
			K	S	Rp.	K	Rp.	K	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
			4			5		6			10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6*100		13 = 11		14 = 13/4*100				15	16
	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5	Berita Acara	1.400.000.000			2	berita acara	457.236.328	1	0	2	453.811.234	100.00	99	2	453.811.234	40.00	32.42	KATIM BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN		
	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	2970	Usulan	600.000.000			990	Usulan	155.072.007	990	5.652.000	990	147.371.300	100.00	95	990	147.371.300	33.33	24.56	KATIM BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN		
	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Diletakkan(RP,MD/RKP/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Diletakkan(RP,MD/RKP/RKPD)	9	Dokumen	1.950.000.000			4	dokumen	683.464.498	4	500.276.856	4	651.037.814	100.00	95	4	651.037.814	44.44	33.39	KATIM BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN		
5	01	02	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keterisian data indikator dalam dokumen perencanaan	100	persen	1.400.000.000	100	persen	348.840.101	20	136.453.525	100	341.918.025	100.00	98.02	100	341.918.025	100	24.42	KATIM DATA DAN INFORMASI		
5	01	02	2.02	01	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	650	orang	1.400.000.000	554	orang	348.840.101	277	136.453.525	554	341.918.025	100.00	98	554	341.918.025		24.42		
5	01	02	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	3	urusan	1.357.897.533	3	urusan	322.659.215	3	96.550.114	3	317.146.626	100.00	98.29	3	317.146.626	100	23.36	KATIM PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN		
						5	Unsur		5	Unsur		5											terdapat perbedaan di target tahunan renstra dengan target akhir renstra akan disesuaikan di DPA perubahan reguler	
				01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	6	Laporan	574.123.935	2	Laporan	251.628.187	2	51.199.114	2	248.394.826	100.00	99	2	248.394.826	33	43.27		
				03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6	Laporan	783.773.598	2	Laporan	71.031.028	2	45.351.000	2	68.751.800	100.00	97	2	68.751.800	33	8.77		
5	01	02	2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen pengelolaan data pada SIPD E-Walidata	2	Dokumen	870.000.000	100	persen	191.686.369	60	99.595.928	100	184.181.784	100.00	96.08	100	184.181.784	100	96.08	KATIM DATA DAN INFORMASI		
				01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	2	Dokumen	870.000.000	3	dokumen	191.686.369	2	99.595.928	3	184.181.784	100.00	96	3	184.181.784	150	21.17		terdapat perbedaan di target tahunan renstra dengan target akhir renstra akan disesuaikan di DPA perubahan reguler
5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Substansi Dokumen Perencanaan pembangunan dengan Aturan	100	persen	16.907.605.413	100	persen	9.692.540.716	47	6.678.870.226	100.00	9.598.078.785	100.00	99.03	100	9.598.078.785	100	56.77	BIDANG PPM, PSDA DAN IPW		
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen bahan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	35	Dokumen	6.023.300.817	5	dokumen	2.149.965.680	4	1.132.821.154	5	2.127.924.134	100.00	98.97	5	2.127.924.134	14.29	35.33	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) berdasarkan DPA	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026			Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	S	Rp.	K	Rp.	K	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4			5		6			10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6*100		13 = 11		14 = 13/4*100			
			15	Dokumen			5			5												
			15	Dokumen			5			5												
			21	PD			12			12												
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	7	Dokumen	637.236.577,00		4	Dokumen	355.832.469	4	130.754.978	4	349.795.621	100,00	98	4	98	57	0,00		KATIM BID PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG PEMERINTAHAH	
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13	Perangkat Daerah	475.000.000,00		3	laporan	30.734.083	2	2.666.000	3	29.616.000	100,00	96	3	29.616.000	23	6,23		KATIM BID PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG PEMERINTAHAH	
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	7	Laporan	300.000.000,00		5	laporan	35.359.630	3	23.262.000	5	34.373.000	100,00	97	5	34.373.000	71	11,46		KATIM BID PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG PEMERINTAHAH	
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM/JMD pada Bidang Pemerintahan	1	Laporan	725.000.000,00		3	laporan	102.500.714	3	79.843.000	3	100.846.500	100,00	98	3	100.846.500	300	13,91		KATIM SINERGRITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAH DAN	
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7	Dokumen	725.000.000,00		4	Dokumen	1.026.828.650	4	515.381.353	4	1.020.759.634	100,00	99	4	1.020.759.634	57	140,79		KATIM BID PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8	Perangkat Daerah	461.064.240,00		3	laporan	36.219.074	2	4.746.000	3	34.911.000	100,00	96	3	34.911.000	38	7,57		KATIM BID PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7	Perangkat Daerah	1.075.000.000,00		5	laporan	76.118.454	3	33.084.928	5	75.165.784	100,00	99	5	75.165.784	71	6,99		KATIM BID PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM/JMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	Laporan	1.625.000.000,00		3	laporan	486.372.586	3	343.082.895	3	482.456.395	100,00	99	3	482.456.395	300,00	29,69		KATIM SINERGRITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMFRINTAH DAN	

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) berdasarkan DPA	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026			Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
			K	S	Rp.	K	Rp.	K	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
			4			5		6			10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6*100		13 = 11		14 = 13/4*100						
1	2	3	4			5		6			10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6*100		13 = 11		14 = 13/4*100		15	16			
	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3	Perangkat daerah	188.600.000		3	Laporan	44.275.914		1	26.783.000	3	43.083.900	100.00	97	3	43.083.900	100	22.84	KATIM BID PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG SDA			
	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergias dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRPJMMD pada Bidang SDA	2	Laporan	522.500.000		2	Laporan	32.487.918		2	7.619.600	2	31.356.600	100.00	97	2	31.356.600	100	6.00	KATIM BID PERENCANAAN DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN DAN			
5	01	03	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	12	Dokumen	6.757.065.241		5/5/15	dokumen	5.749.048.809		4.393.264.518	5/5/15	5.704.276.586	100.00	99.22	5/5/15	5.704.276.586	351.075	84.42	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH		
				Jumlah Dokumen bahan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2	Dokumen																			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2	Dokumen																			
				Jumlah Perangkat Daerah yang diarahkan dalam penyusunan Perencanaan pembangunan Daerah dan perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	44	Perangkat Daerah																			
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMMD dan RKPD)	3	Dokumen	927.065.241		3	Dokumen	1.314.483.180		1.124.427.128	3	1.304.306.934	100.00	99	3	1.304.306.934	100	140.69	KATIM BID PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG INFRASTRUKTUR	
	02			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	Perangkat Daerah	575.000.000		4	Laporan	37.490.380		3	12.320.000	4	35.700.000	100.00	95	4	35.700.000	100	6.21	KATIM BID PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG INFRASTRUKTUR	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) berdasarkan DPA	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026			Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	S	Rp.	K	Rp.	K	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
			4			5		6			10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6*100		13 = 11		14 = 13/4*100			
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	Perangkat Daerah	150,000,000			4	Laporan	46,248,529	2	27,570,000	4	45,668,500	100.00	99	4	45,668,500	100	30.45	KATIM BID PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG INFRASTRUKTUR	
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3	Dokumen	1,500,000,000			3	Laporan	1,357,494,566	3	837,227,181	3	1,356,341,200	100.00	100	3	1,356,341,200	100	90.42	KATIM SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH INFRASTRUKTUR DAN	
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	3	Dokumen	1,280,000,000			4	Dokumen	182,271,598	3	119,324,253	4	174,429,109	100.00	96	4	174,429,109	133	13.63	KATIM BID PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG KEWILAYAHAN	
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	40	Perangkat Daerah	875,000,000			1	Laporan	76,555,946	0	34,568,928	1	63,453,784	100.00	83	1	63,453,784	3	7.25	KATIM BID PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG KEWILAYAHAN	
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	40	Perangkat Daerah	300,000,000			4	Laporan	50,564,069	2	17,492,028	4	49,914,884	100.00	99	4	49,914,884	10	16.64	KATIM BID PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG KEWILAYAHAN	
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2	Dokumen	1,150,000,000			2	Laporan	2,683,940,541	2	2,220,335,000	2	2,674,462,175	100.00	100	2	2,674,462,175	100	232.56	KATIM SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH INFRASTRUKTUR DAN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) berdasarkan DPA	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026			Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
			K	S	Rp.	K	Rp.	K	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
			4			5		6			10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6*100		13 = 11		14 = 13/4*100							
5	05	02				100	persen	5,074,943,525			100	persen	3,202,656,210	30.00	1,428,144,138	100	3,169,369,789	100.00	98.96	100	3,169,369,789	100	62.45	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	02	2	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah				100	persen	99,959,925	100.00	98,127,000	100	98,127,000	100.00	98.17	100	98,127,000	0	-	KATIM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN	Kegiatan dan Sub Kegiatan Baru		
				0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				1	Rekomendasi	99,959,925	1	98,127,000	1	98,127,000	100.00	98	1	98,127,000	-	-		sub kegiatan Baru		
5	05	02	2.02	02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Dokumen kajian Bidang Sosial dan kependudukan yang menjadi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	100	persen	1,383,538,144			100	persen	498,660,502	50	447,480,600	100	490,363,000	100.00	98	100	490,363,000	100	35.44	KATIM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN	
				01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	9	Dokumen	1,283,538,144.00			3	dokumen	498,660,502	3	447,480,600	3	490,363,000	100.00	98	3	490,363,000	33	38.20		
				02	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	dokumen	100,000,000.00					0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah	100	persen	1,998,000,000			100	persen	2,110,033,887	30	527,398,778	100	2,097,973,984	100.00	99	100	2,097,973,984	100	105.00	KATIM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
				01	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	6	Dokumen	874,000,000			2	dokumen	151,569,305	2	87,890,928	2	148,811,784	100.00	98	2	148,811,784	33	17.03		
					Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					1	dokumen	99,959,925	1	97,927,000	1	97,927,000	100.00	98	1	97,927,000	-	-		sub kegiatan Baru		
					Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah					1	dokumen	99,959,925	1	98,127,000	1	98,127,000	100.00	98	1	98,127,000	-	-				
					Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan					1	Dokumen	100,000,000				-	-				-	-		sub kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025 dan 2026		
					Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup					1	Dokumen	100,000,000				-	-				-	-				
					Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum					1	Dokumen	220,000,000				-	-				-	-				
					Penelitian dan Pengembangan Perhubungan					1	Dokumen	242,000,000				-	-				-	-				
				02	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Dokumen	220,000,000			1	dokumen	1,758,544,732	1	243,453,850	1	1,753,108,200	100.00	100	1	1,753,108,200	100	796.87		
					Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika					1	Dokumen	242,000,000				-	-				-	-		sub kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025 dan 2026		
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah	825	Inovasi	1,693,405,381			100	persen	494,001,896	10	355,137,760	100	482,905,805	100.00	98	100	482,905,805	12	28.52	KATIM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI	
				01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3	Dokumen	1,164,605,381.00			1	Dokumen	365,227,548	1	341,662,560	1	358,840,705	100.00	98	1	358,840,705	33	30.81		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) berdasarkan DPA	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026			Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
			K	S	Rp.	K	Rp.	K	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
			4			5		6			10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6*100		13 = 11		14 = 13/4*100				
1	2	3	4			5		6			10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6*100		13 = 11		14 = 13/4*100		15	16	
	02	Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikas dan inovasi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	3	Laporan	51,000,000.00			1	Laporan	30,371,436		4,680,200	1	29,576,700	100.00	97	1		33	-			
	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	3	Laporan	370,000,000.00			1	Laporan	58,246,357		0	1	57,084,500	100.00	98	1		33	-			
	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Kelompok	3	Laporan	38,000,000.00			1	Laporan	30,247,542		8,795,000	1	29,677,900	100.00	98	1		33	-			
	05	Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual	3	Laporan	69,800,000.00			1	Laporan	9,909,013			1	7,726,000	100.00	78	1	7,726,000	33	11.07			
5	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	persen	61,936,594,220		100	persen	27,199,801,754	66.31	10,629,038,577	100.00	26,773,181,877	100.00	98.43	100	26,773,181,877	100	43.23	SEKRETARIAT		
5	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	Dokumen	1,846,944,272		7	Dokumen	432,346,530	3	157,836,800	7	418,483,500	100.00	96.79	7	418,483,500	41	22.66	KATIM PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN KINERJA PD	
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	838,805,855			8	Dokumen	121,939,178	6	49,882,500	8	118,684,675	100.00	97	8	118,684,675	100	14.15			
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	104,470,077			1	Dokumen	20,217,447	1	6,065,000	1	18,309,000	100.00	91	1	18,309,000	100.00	17.53			
	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dokumen	72,047,342			1	Dokumen	18,409,587	1	17,354,000	1	17,354,000	100.00	94	1	17,354,000	33.33	24.09			
	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3	Dokumen	102,249,643			1	Dokumen	21,984,744	1	20,609,000	1	20,609,000	100.00	94	1	20,609,000	33.33	-			
	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	Dokumen	37,378,268			1	Dokumen	17,444,621	1	11,830,100	1	16,533,100	100.00	95	1	16,533,100	33.33	-			
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Dokumen	45,803,269			5	Dokumen	88,848,929	4	2,536,200	5	85,143,725	100.00	96	5	85,143,725	166.67	185.89			
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51	Laporan	646,189,818			6	Laporan	143,502,024	4	49,560,000	6	141,850,000	100.00	99	6		12	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) berdasarkan DPA	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026			Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
			K	S	Rp.	K	Rp.	K	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
			4			5		6			10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6*100		13 = 11		14 = 13/4*100						
1	2	3	4			5		6			10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6*100		13 = 11		14 = 13/4*100		15	16			
5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	36	Dokumen	43.883,613,282			12	Dokumen	17.528,351,138	3	4.608,241,366	12	17.287,903,654	100,00	98,63	12	17.287,903,654	33,33	39,39	KATIM KEUANGAN	
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	Bulan	43.469,811,473,00			14	orang/bulan	17.441,309,825	3	4.588,257,666	14	17.204,815,984	100,00	99	14	17.204,815,984	33	39,58		
			02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	Dokumen	140,199,829			12	Dokumen	28,931,352	3	3.560,200	12	27,476,700	100,00	95	12	27,476,700	33	19,60		
			03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36	Dokumen	73,752,515,00			12	Dokumen	7,733,823	3	2,739,500	12	7,233,070	100,00	94	12	7,233,070	33	9,81		
			04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan	65,212,997			1	Laporan	23,326,121	1	10,465,600	1	22,695,500	100,00	97	1	22,695,500	33	34,80		
			05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54	Laporan	134,636,468,00			18	Laporan	27,050,017	3	3,218,400	18	25,682,400	100,00	95	18	25,682,400	33,33	19,08		
5	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen kantor	6	Dokumen	164,257,343			6	Dokumen	23,823,428	5	7,954,600	6	23,222,600	100,00	97,48	6	23,222,600			KATIM UMPEG	
			01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dokumen	68,578,744			4	Dokumen	7,371,534	2	2,273,700	4	7,224,700	100,00	98	4	7,224,700	133	10,53		
			02	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	35,217,010			1	Laporan	9,006,180	1	3,967,900	1	8,764,400	100,00	97	1	8,764,400	33	24,89		
			03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	60,461,589			1	Laporan	7,445,714	1	1,713,000	1	7,233,500	100,00	97	1	7,233,500	33	11,96		
5	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen kantor	10	Dokumen	1,689,113,399			100	persen	739,239,869	90	450,686,700	100	709,212,180	100,00	95,94	100	709,212,180			KATIM UMPEG	
						78	ASN				78	ASN		78										terdapat perbedaan di target tahunan renstra dengan target akhir renstra akan disesuaikan di DPA perubahan reguler	
						450	Unit	84,694,177							-	-								sub kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025 dan 2026	
						450	Paket	335,202,376							-	-									
			01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36	Dokumen	80,554,293			12	Dokumen	20,587,836	6	4,719,300	12	15,400,100	100,00	75	12	15,400,100	33	19,12		
						36	Dokumen	94,819,329							-	-									
			02	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	36	Dokumen	304,999,884			12	Dokumen	48,932,467	12	48,012,500	12	48,012,500	100,00	98	12	48,012,500	33	15,74		
			03	48012500	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	Dokumen	126,097,866			105	orang	127,427,555	96	78,405,000	105	123,335,100	100,00	97	105	123,335,100	350	97,81		
			04	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	405	orang	95,267,714			135	orang	17,384,236	100	8,499,900	135	15,162,900	100,00	87	135	15,162,900	33	-		
			05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300	Orang	567,477,760			110	orang	524,907,775	110	311,050,000	110	507,301,580	100,00	97	110	507,301,580	36,67	89,40		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) berdasarkan DPA	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026			Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
			K	S	Rp.	K	Rp.	K	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
			4			5		6			10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6*100		13 = 11		14 = 13/4*100						
1	2	3	4			5		6			10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6*100		13 = 11		14 = 13/4*100		15	16			
5	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tingkat pemenuhan dukungan manajemen kantor	30	Dokumen	6,133,874,359		10	Dokumen	2,021,978,960	8	980,263,458	10	1,955,680,227	100.00	96.72	10	1,955,680,227	33	31.88	KATIM UMPEG		
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	Paket	238,349,875		8	paket	119,470,689	7	29,690,000	8	115,577,000	100.00	97	8	115,577,000	33	48.49		
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45	Paket	510,444,163		15	paket	743,358,568	5	341,750,000	15	716,885,000	100.00	96	15	716,885,000	33	140.44		
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	1,169,587,288		4	paket	158,063,948	2	28,918,000	4	148,666,500	100.00	94	4	148,666,500	33	12.71		
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	1,713,996,928		4	paket	91,005,960	1	29,396,600	4	88,414,600	100.00	97	4	88,414,600	100	5.16		
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	paket	422,390,490		3	paket	172,787,820	2	109,968,500	3	162,349,800	100.00	94	3	162,349,800	100	38.44		terdapat perbedaan di target tahunan renstra dengan target akhir renstra
						61 jenis 157500 lembar 985 Meter																			
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		20235	Dokumen	132,324,921																
				06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	22200	Laporan	419,649,238		7350	Laporan	69,255,000	7330	14,080,000	7,350	57,330,000	100.00	83	7,350	57,330,000	33	13.66		
				07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1335	Laporan	1,399,867,129		509	Laporan	505,942,054	289	282,407,508	509	505,934,877	100.00	100	509	505,934,877	38.13	36.14		
				08	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36	Dokumen	77,190,576		12	Dokumen	24,747,396	6	11,556,000	12	24,027,000	100.00	97	12	24,027,000	33	31.13		
				09	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	50,073,751		1	Dokumen	137,347,526	1	132,496,850	1	136,495,450	100.00	99	1	136,495,450	33	272.59		
5	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tingkat pemenuhan dukungan manajemen kantor	30	Paket	858,223,897		5	Paket	912,910,327	3	785,965,000	5	900,965,000	100.00	98.69	5	99	17	0.00	KATIM UMPEG		
					Pengadaan Mebel		12	Unit	269,144,482															sub kegiatan yang dilaksanakan di tahun	
				01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	72	Unit	108,973,466		13	Unit	194,450,300	7	99,760,000	13	188,160,000	100.00	97	13	188,160,000	18.06	172.67		
				02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	Unit	165,382,682		3	Unit	718,460,027	2	686,205,000	3	712,805,000	100.00	99	3	712,805,000	25.00	431.00		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		21	Unit	244,723,267															sub kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025 dan 2026	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) berdasarkan DPA	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026			Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
			K	S	Rp.	K	Rp.	K	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
			4			5		6			10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6*100		13 = 11		14 = 13/4*100					
1	2	3	4			5		6			10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6*100		13 = 11		14 = 13/4*100		15	16		
				11	Unit	70,000,000																	sub kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025 dan 2026	
5	01	01	2.08																					
				30	Dokumen	4,976,180,360			3	Dokumen	1,916,165,132	2	562,434,196	3	1,867,624,280	100.00	97.47	3	1,867,624,280	10	37.53	KATIM UMPEG		
	01			800	Laporan	28,021,747			800	Laporan	5,600,000	400	-	800	5,600,000	100.00	100	800	5,600,000	100.00	19.98			
				2700	lembar																			
	02			4	Laporan	2,588,986,465			4	Laporan	827,135,718	2	211,360,968	4	782,982,630	100.00	95	4	782,982,630	100	30.24			
				12	Jaringan																			
	03			3	Laporan	20,237,930			3	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	di drop di perubahan reguler	
				9	Paket																			
	04			12	Laporan	2,338,934,218			12	Laporan	1,083,429,414	6	351,073,228	12	1,079,041,450	100.00	100	12	1,079,041,450	100.00	46.13			
				42	Orang																			
5	01	01	2.09																					
				24	Dokumen	2,384,387,308			6	Dokumen	3,624,986,370	5	3,075,656,457	6	3,610,090,436	100.00	99.59	6	3,610,090,436	25	151.41	KATIM UMPEG		
	01			78	Unit	691,530,039			25	Unit	246,255,000	20	142,254,807	25	235,517,606	100.00	96	25	235,517,606	32.05	34.06			
				63	Unit	81,885,772																	sub kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025 dan 2026	
	02			263	Unit	340,004,994			129	Unit	134,043,800	94	60,940,000	129	132,708,000	100.00	99	129	132,708,000	49	-			
	03			1596	Unit	738,816,854			3	Unit	2,956,879,330	0	2,777,249,950	3	2,956,879,330	100.00	100	3	2,956,879,330	0.19	400.22			
	04			145	Unit	471,948,509			60	Unit	40,626,000	30	25,911,700	60	38,911,700	100.00	96	60	38,911,700	41.38	8.24			
	05			30	Unit	60,201,140			2	Unit	247,182,240	2	69,300,000	2	246,073,800	100.00	100	2	246,073,800	6.67	408.75			



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. SURYANTO PUTRA, M.Si
Jabatan : Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BACHRIL BAKRI
Jabatan : Pj. BUPATI BOGOR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

BACHRIL BAKRI



Bogor, 25 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA,

Ir. SURYANTO PUTRA, M.Si
NIP. 196706261999011001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
Pit. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas Pengukuran kinerja pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	Poin	15.83
2	Meningkatnya kualitas Perencanaan kinerja pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	Poin	23.81
3	Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi yang Bermanfaat	Persentase Riset yang dihasilkan Menjadi Dasar Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	100
		Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3,202,656,210	APBD
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27,199,748,613	APBD
3	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3,392,701,311	APBD
4	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	9,692,540,721	APBD

Pj. BUPATI BOGOR,

BACHRIL BAKRI

Bogor, 25 Oktober 2024
Pit. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,

Ir. SURYANTO PUTRA, M.Si
NIP. 196706261999011001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENDIK SUPIANI S.P, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. SURYANTO PUTRA, M.Si
Jabatan : Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Ir. SURYANTO PUTRA, M.Si
NIP. 196706261999011001

Bogor, 25 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA,

ENDIK SUPIANI S.P, M.Si
NIP. 196808031998031005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan , Penganggaran, Pengukuran dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	Indeks	100
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan PD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Sesuai Ketentuan	%	100
3	Pengelolaan Aset yang Berkualitas	Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100
4	Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah yang berkualitas	Tingkat Kepuasan Pegawai	Skala	4
5	Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Tingkat Pemenuhan Sarana Operasional Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	%	80
6	Meningkatnya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah unsur penunjang Perangkat Daerah sesuai Aturan	%	90
7	Meningkatnya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Sesuai Ketentuan	%	100
8	Berfungsinya Barang Milik Daerah Dengan Baik	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	%	90

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	462,291,538	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17,528,351,138	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23,823,428	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	739,239,869	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,026,603,961	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	912,910,327	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,881,541,982	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,624,986,370	APBD

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,



Ir. SURYANTO PUTRA, M.Si
NIP. 196706261999011001

Bogor, 25 Oktober 2024
SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,



ENDIK SUPIANI S.P, M.Si
NIP. 196808031998031005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMI KARMELLIA S.HUT, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. SURYANTO PUTRA, M.Si
Jabatan : Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Ir. SURYANTO PUTRA, M.Si
NIP. 196706261999011001

Bogor, 25 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA,

RAHMI KARMELLIA S.HUT, M.Si
NIP. 197208211998032004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam yang sesuai ketentuan	Skala	5
2	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dokumen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam yang disusun secara berjenjang dan berkelanjutan	Skala	5

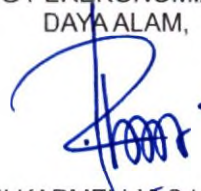
No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1,793,526,227	APBD

Pit. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,



Ir. SURYANTO PUTRA, M.Si
NIP. 196706261999011001

Bogor, 25 Oktober 2024
KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER
DAYA ALAM,



RAHMI KARMELLIA S.HUT, M.Si
NIP. 197208211998032004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TIKA MUSTIKA EFFENDI ST, M.Sc
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. SURYANTO PUTRA, M.Si
Jabatan : Pjt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Ir. SURYANTO PUTRA, M.Si
NIP. 196706261999011001

Bogor, 25 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA,

TIKA MUSTIKA EFFENDI ST, M.Sc
NIP. 197507162005012009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai ketentuan	Skala	5
2	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun secara berjenjang dan berkelanjutan	Skala	5

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2,149,965,685	APBD

Pit. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,



Ir. SURYANTO PUTRA, M.Si
NIP. 196706261999011001

Bogor, 25 Oktober 2024
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA,



TIKA MUSTIKA EFFENDI ST, M.Sc
NIP. 197507162005012009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HEKSI LESTARI ST, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. SURYANTO PUTRA, M.Si
Jabatan : Pjt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Ir. SURYANTO PUTRA, M.Si
NIP. 196706261999011001

Bogor, 25 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA,

HEKSI LESTARI ST, M.Si
NIP. 197509061999012001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah dengan Ketentuan yang berlaku	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Skala	5
2	Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Tingkat Ketercapaian IKU Perangkat Daerah dan IKU Pemerintah Daerah	%	30
3	Terpenuhinya Kualitas Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan	%	70.59
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Pengelolaan Data pada SIPD	%	30

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2,529,462,489	APBD
2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	322,712,352	APBD
3	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	348,840,101	APBD
4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	191,686,369	APBD

Pit. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,



Ir. SURYANTO PUTRA, M.Si
NIP. 196706261999011001

Bogor, 25 Oktober 2024
KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN,



HEKSI LESTARI ST, M.Si
NIP. 197509061999012001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIF RACHMAN SUHANDI S.IP, M.M
Jabatan : KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. SURYANTO PUTRA, M.Si
Jabatan : Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Ir. SURYANTO PUTRA, M.Si
NIP. 196706261999011001

Bogor, 25 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA,

ARIF RACHMAN SUHANDI S.IP, M.M
NIP. 197406172002121003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang sesuai ketentuan	Skala	5
2	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Dokumen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang disusun secara berjenjang dan berkelanjutan	Skala	5

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5,749,048,809	APBD

Pit. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,



Ir. SURYANTO PUTRA, M.Si
NIP. 196706261999011001

Bogor, 25 Oktober 2024
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH,



ARIF RACHMAN SUHANDI S.IP, M.M
NIP. 197406172002121003



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RATNA PRATINI ST, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. SURYANTO PUTRA, M.Si
Jabatan : Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Ir. SURYANTO PUTRA, M.Si
NIP. 196706261999011001

Bogor, 25 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA,

RATNA PRATINI ST, MM
NIP. 197912192005012007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
 KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 DAERAH
 KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya ketersediaan bahan kebijakan perencanaan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentasi Riset evaluasi Pemanfaatan hasil Kelitbangan Lingkup Sosial dan kependudukan yang Memenuhi Standar	%	100
2	Meningkatnya ketersediaan bahan kebijakan perencanaan bidang ekonomi dan pembangunan daerah	Persentasi Riset evaluasi Pemanfaatan hasil Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang Memenuhi Standar	%	100
3	Berkembangnya Inovasi dan teknologi dalam mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan inovasi	Persentase Inovasi yang berkembang dan berkelanjutan pada perangkat daerah	%	100
4	Meningkatnya Ketersediaan Bahan Kebijakan Perencanaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	Persentasi Riset evaluasi Pemanfaatan hasil Kelitbangan Lingkup Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan yang Memenuhi Standar	%	100

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	498,660,502	APBD
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2,110,033,887	APBD
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	494,001,896	APBD
4	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	99,959,925	APBD

Pit. KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN DAERAH,



Ir. SURYANTO PUTRA, M.Si
 NIP. 196706261999011001

Bogor, 25 Oktober 2024
 KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN,



RATNA PRATINI ST, MM
 NIP. 197912192005012007